



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Kedua, November 2011
Cetakan Pertama, Juli 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: panoramio.com, halut-news.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	26
Prioritas Bidang Kesehatan.....	29
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
Keuangan Daerah.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2009
Tabel 2.	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
Tabel 3.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
Tabel 4.	Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Tabel 5.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Tabel 6.	Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Tabel 7.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
Tabel 8.	Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
Tabel 9.	Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
Tabel 10.	Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

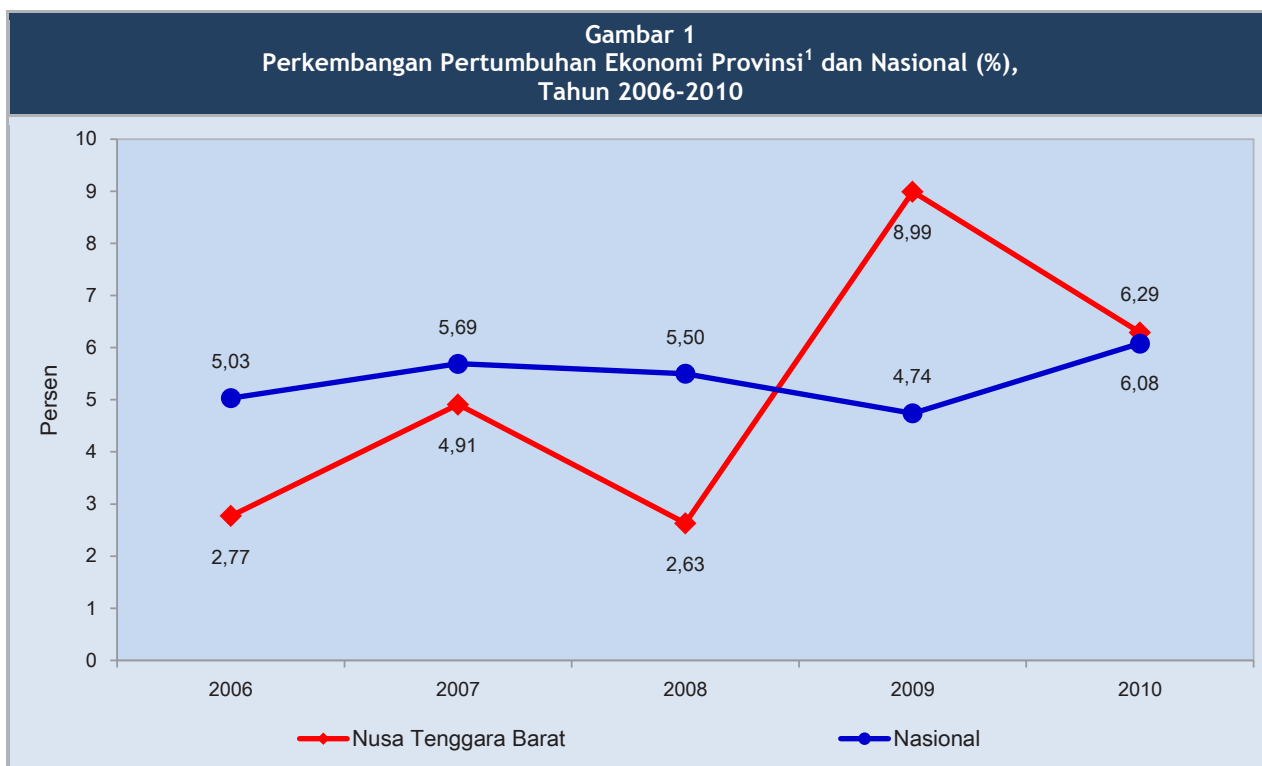


DAFTAR GAMBAR

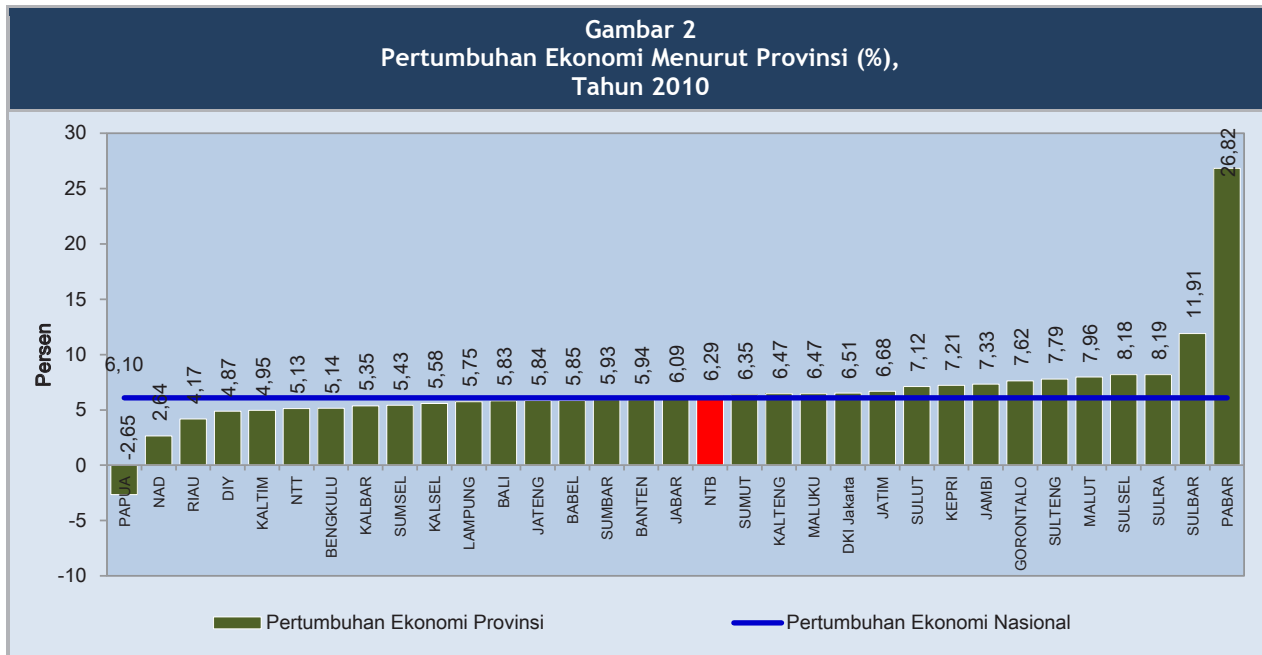
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2010
- Gambar 4. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 5. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Nusa Tenggara Barat (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 6. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 7. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2008-2011
- Gambar 8. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 11. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 15. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 19. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 20. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 28. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 39. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 40. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010 - 2011
- Gambar 42. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 43. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 48. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

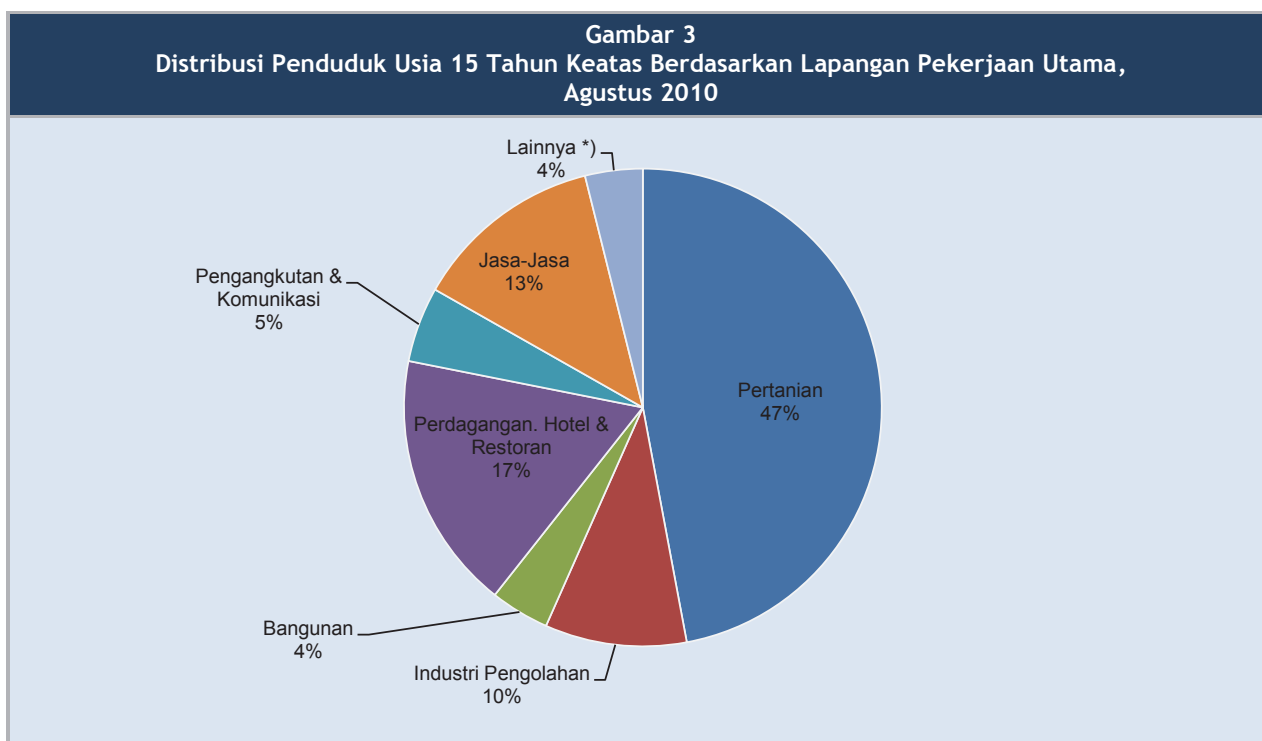
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2009

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Pertanian	8,19	8,91	4,35	4,46	6,01	2,48
Pertambangan Dan Penggalian	10,88	12,99	3,81	4,29	(9,01)	12,54
Industri Pengolahan	1,28	1,53	0,84	0,93	8,73	11,66
Listrik, Gas & Air Bersih	153,89	188,88	60,80	70,08	9,16	15,26
Bangunan	2.299,10	2.939,98	1.248,86	1.457,95	8,76	16,74
Perdagangan, Hotel & Restoran	4.678,20	5.718,87	2.504,70	2.783,67	4,97	11,14
Pengangkutan & Komunikasi	2.786,51	3.111,81	1.319,56	1.392,65	3,40	5,54
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.597,56	1.926,53	892,56	976,97	9,84	9,46
Jasa - Jasa	3.403,36	4.462,22	1.769,15	1.941,14	9,02	9,72
Produk Domestik Regional Bruto	14.938,96	18.371,74	7.804,64	8.632,14	2,63	8,99

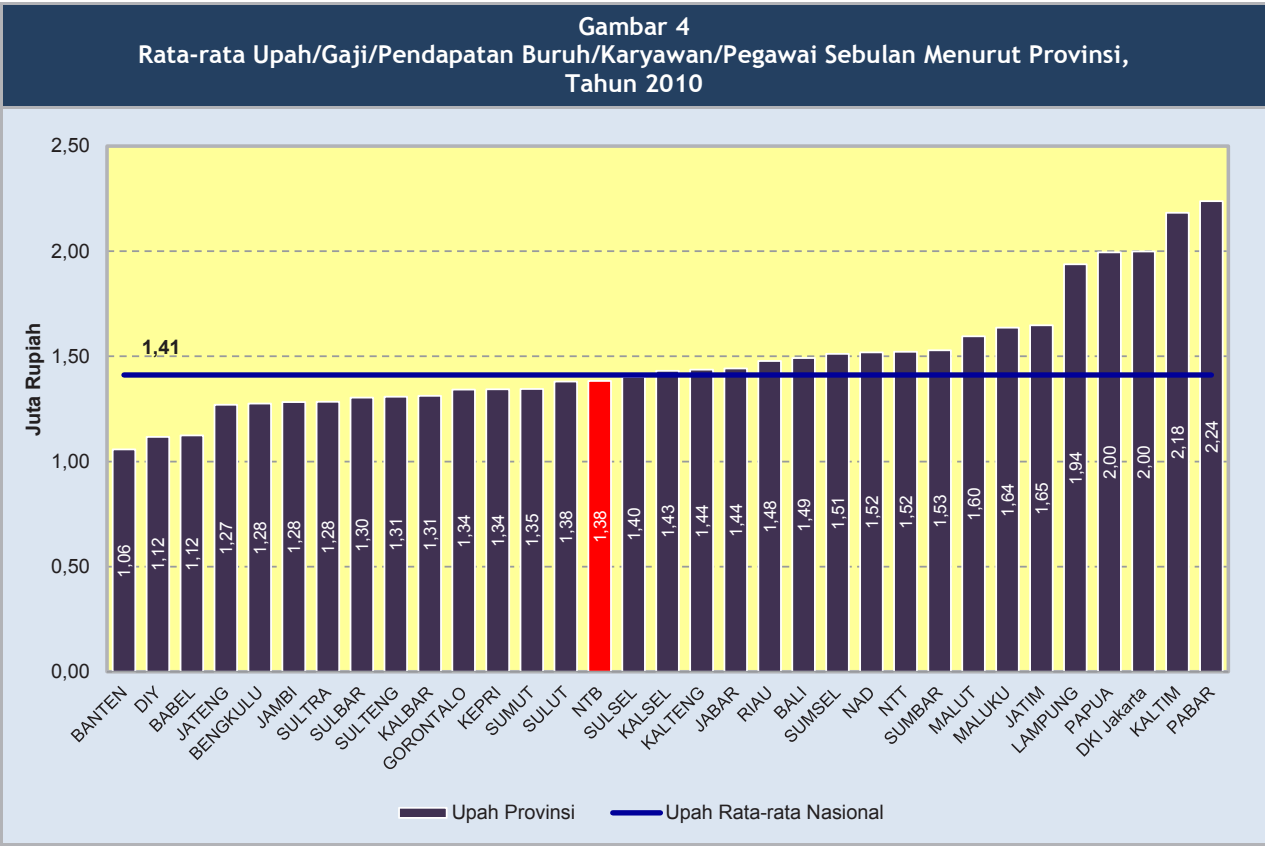
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

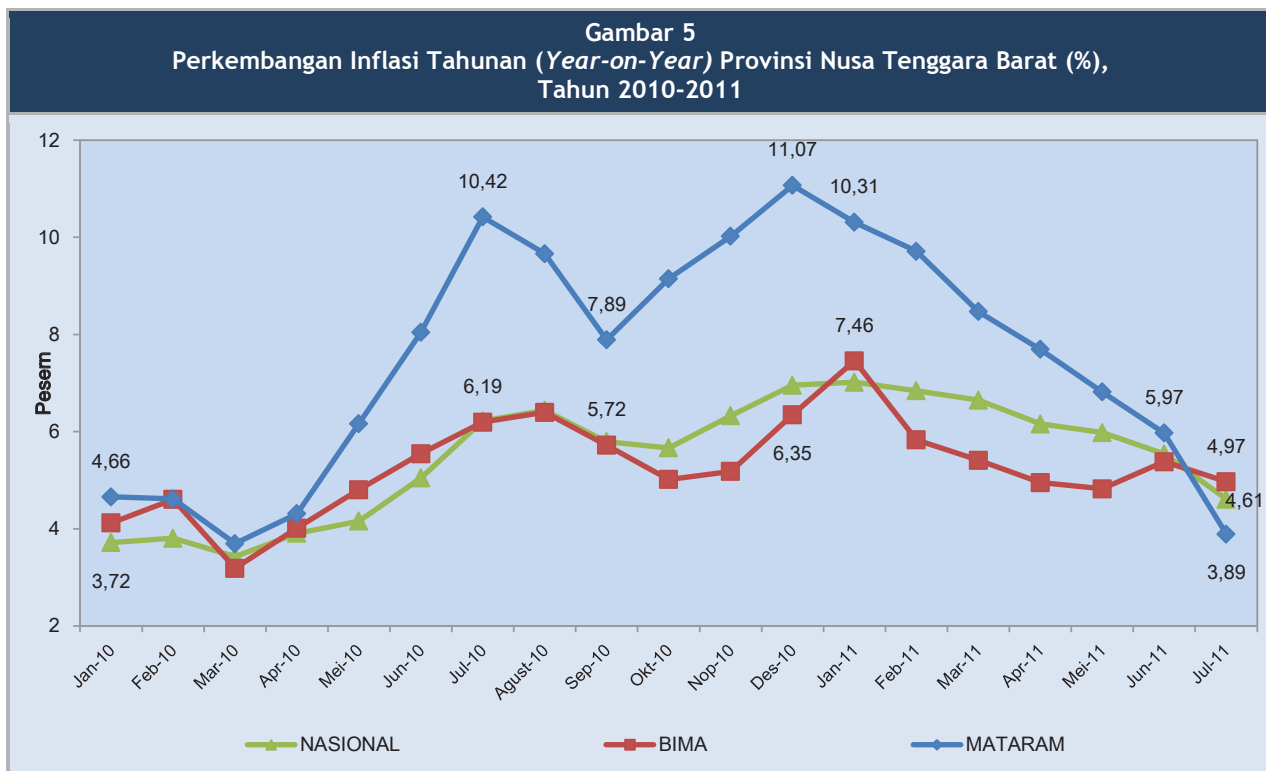
Keterangan: *)Pertambangan & Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Bersih serta Keuangan

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

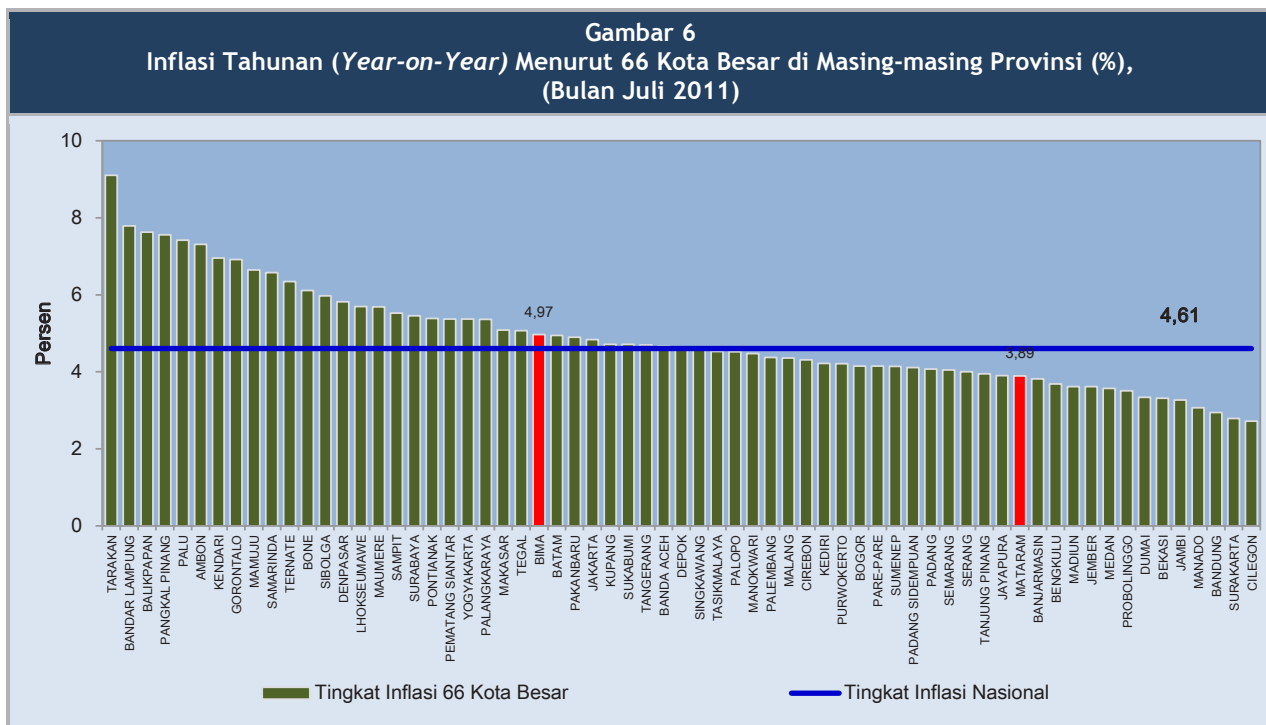


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

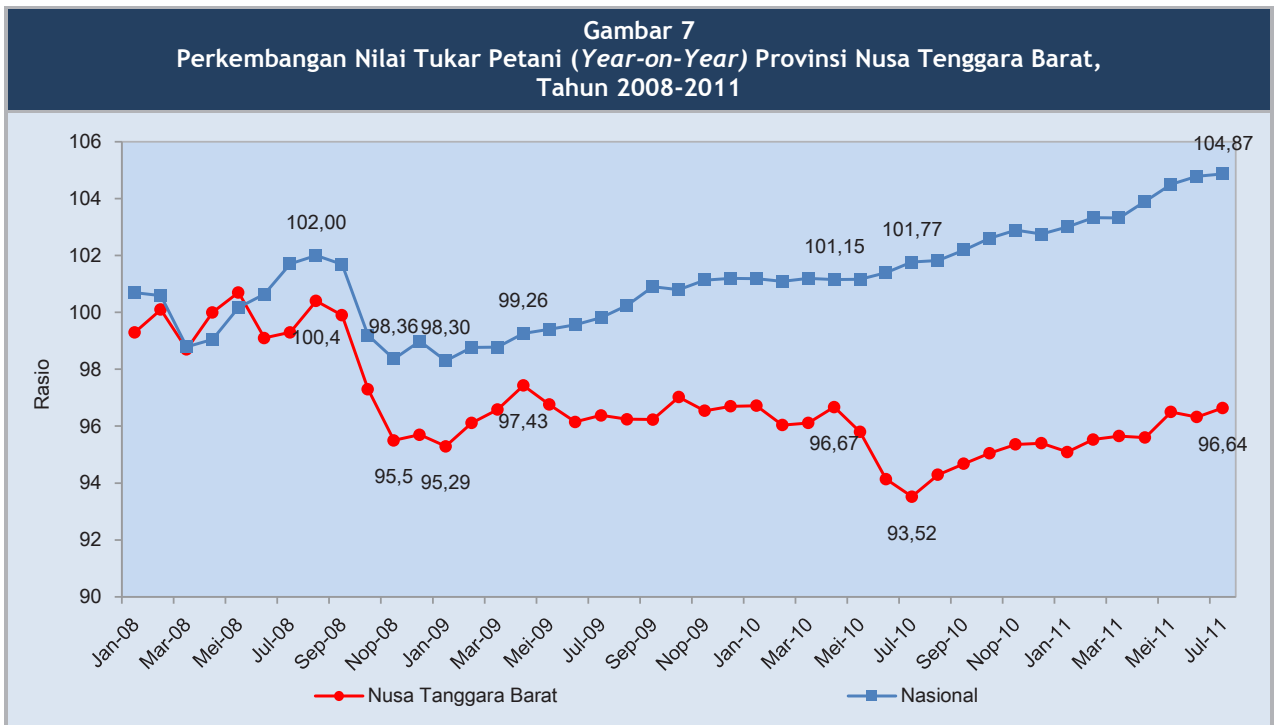


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

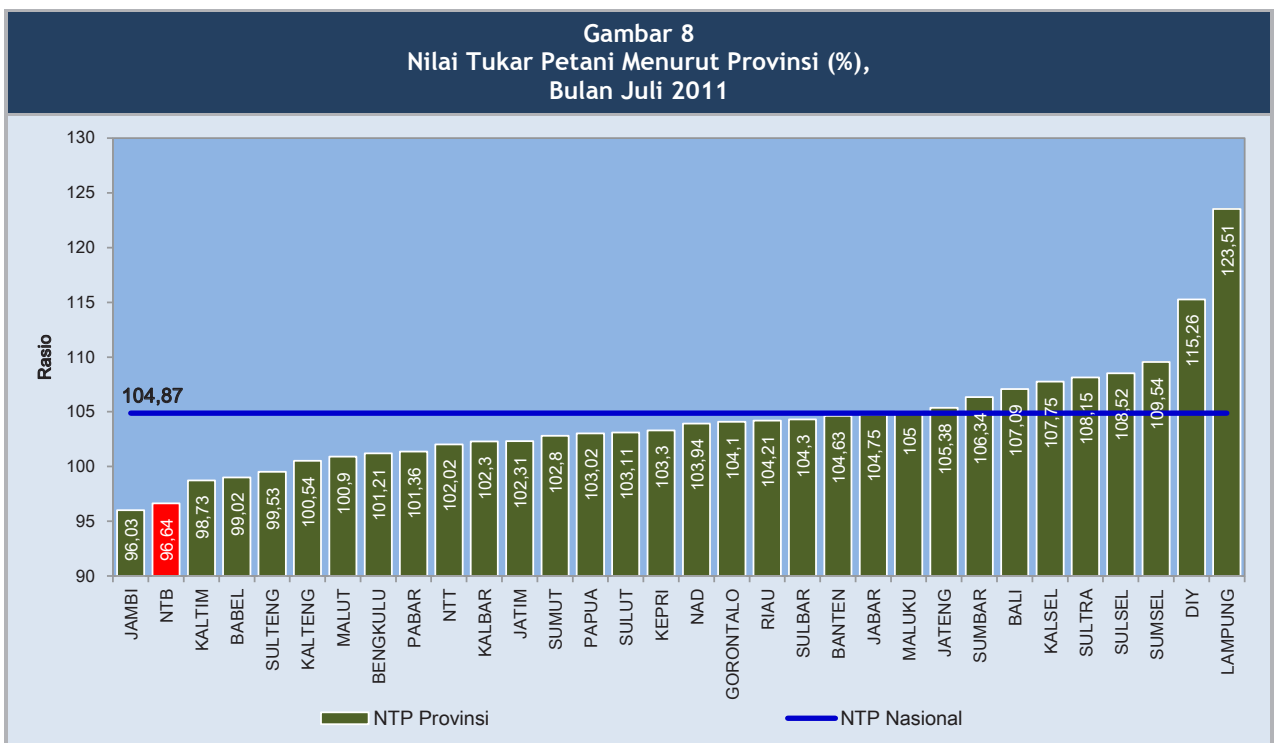


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

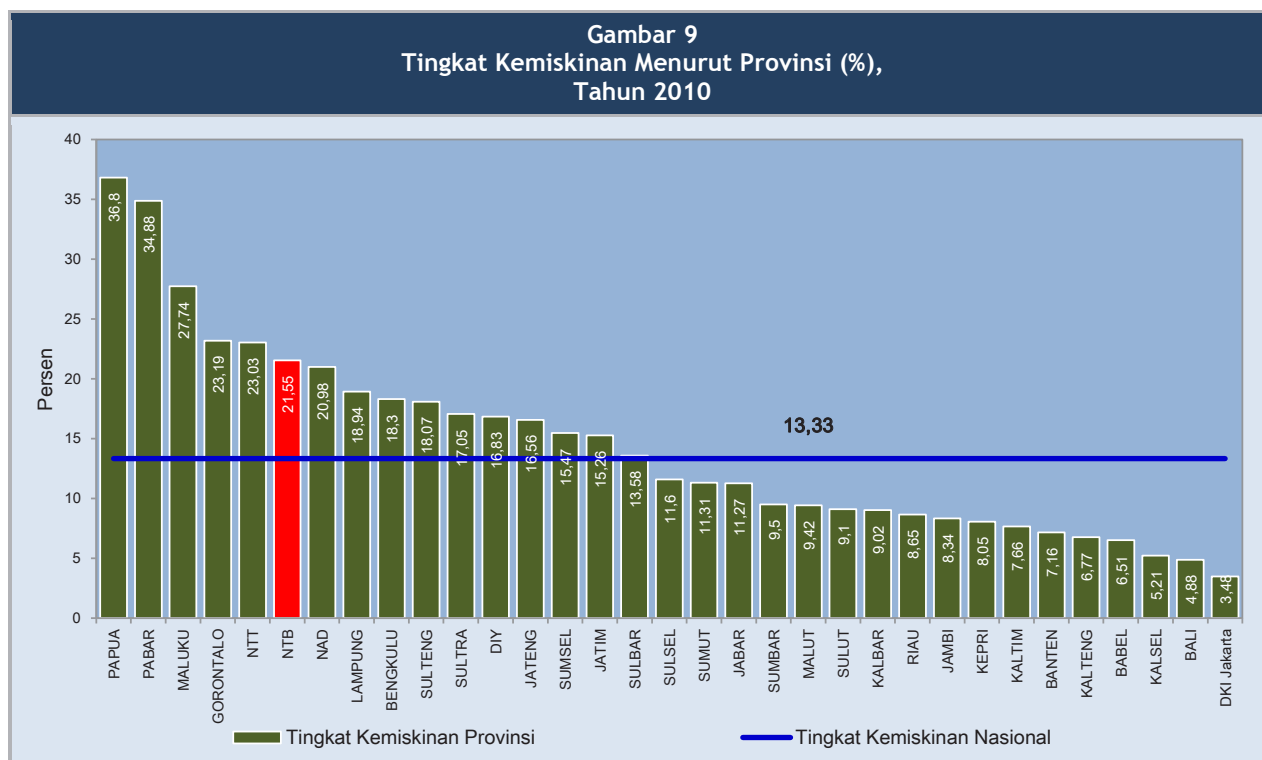


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

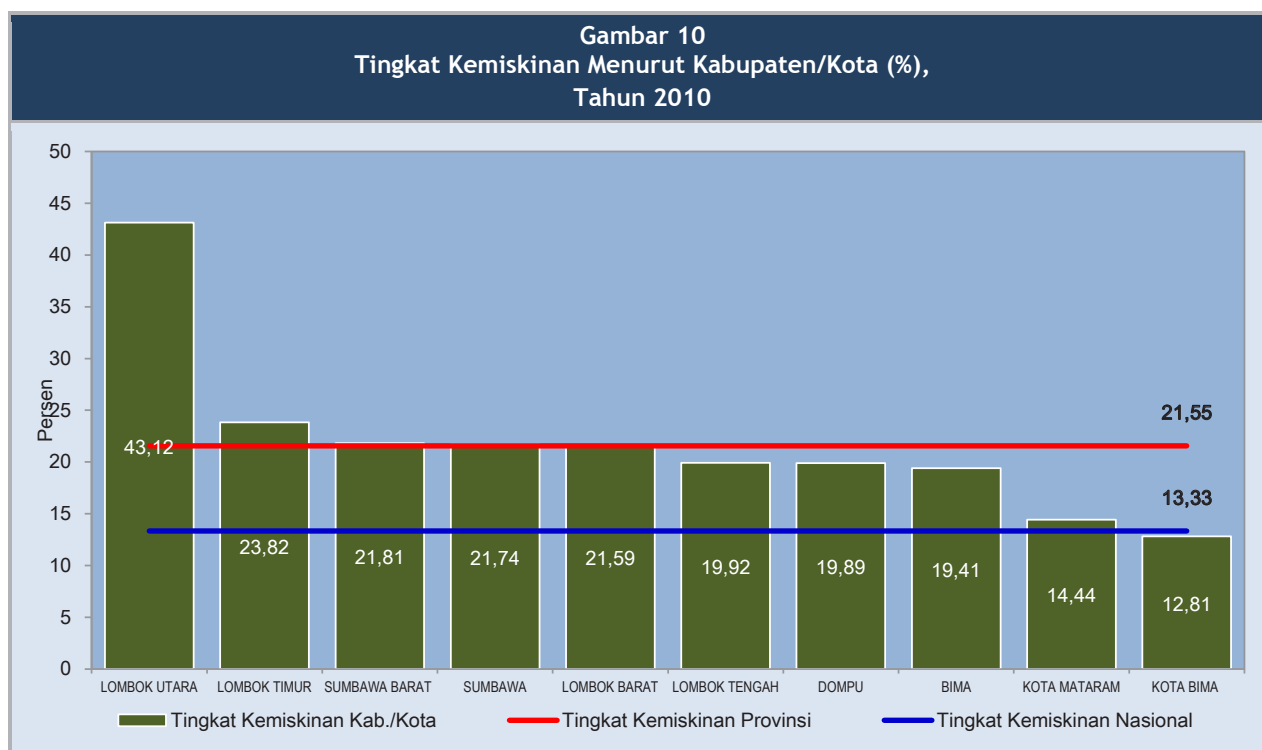


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDIKATOR KEMISKINAN

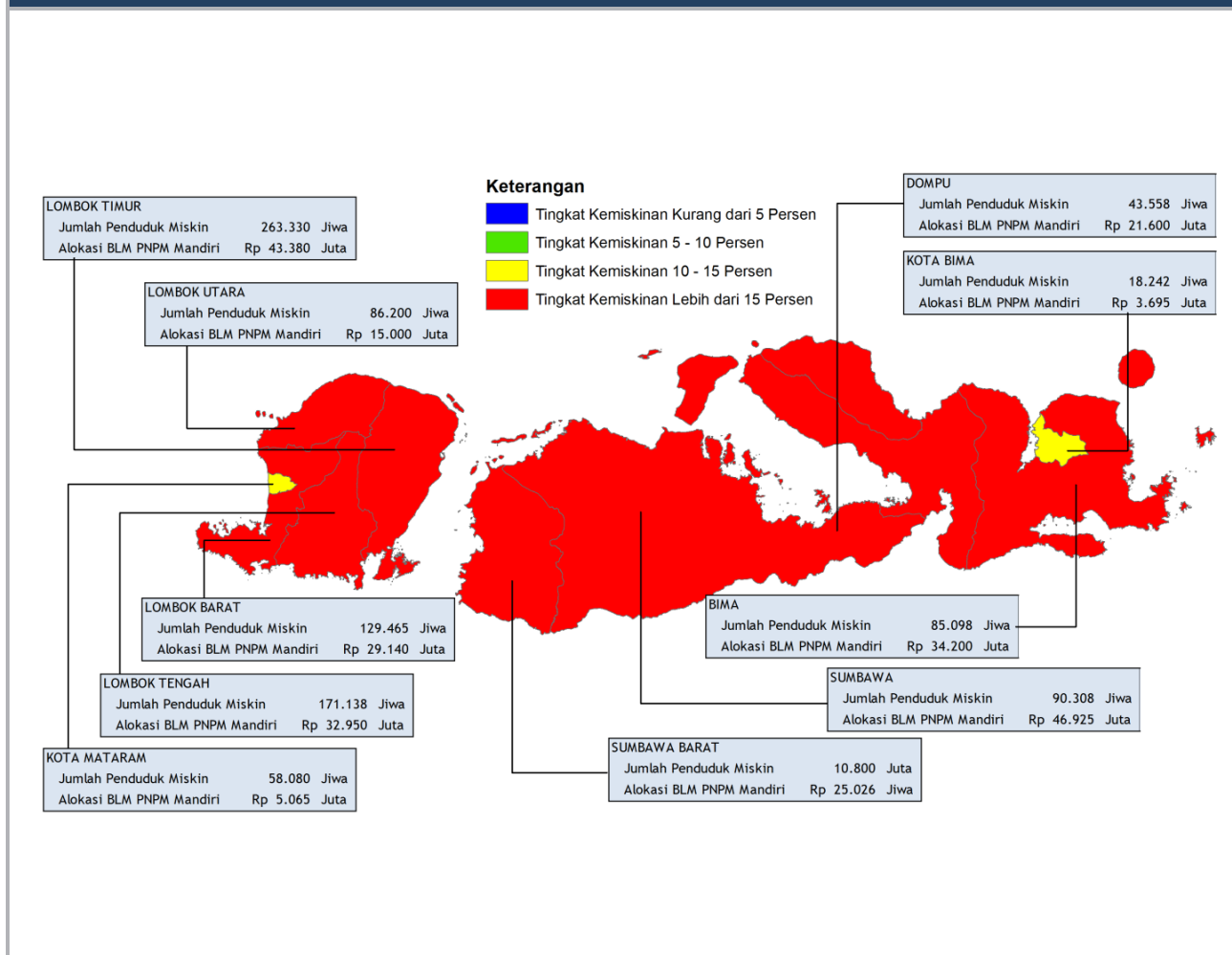
Tabel 2.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LOMBOK BARAT	212 630	245 177	24,02	21,59	208 485	129 465
LOMBOK TENGAH	211 004	243 302	20,94	19,92	187 585	171 138
LOMBOK TIMUR	218 854	252 354	23,96	23,82	270 609	263 330
SUMBAWA	203 436	221 935	23,85	21,74	104 980	90 308
DOMPU	182 699	199 312	21,76	19,89	49 524	43 558
BIMA	190 501	207 823	20,42	19,41	89 699	85 098
SUMBAWA BARAT	269 356	310 586	23,01	21,81	24 336	25 026
LOMBOK UTARA		261 819		43,12		86 200
KOTA MATARAM	242 244	279 324	15,41	14,44	60 637	58 080
KOTA BIMA	206 165	224 912	13,65	12,81	18 890	18 242
NUSA TENGGARA BARAT	167 536	185 025	22,78	21,55	1014 745	970 444
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

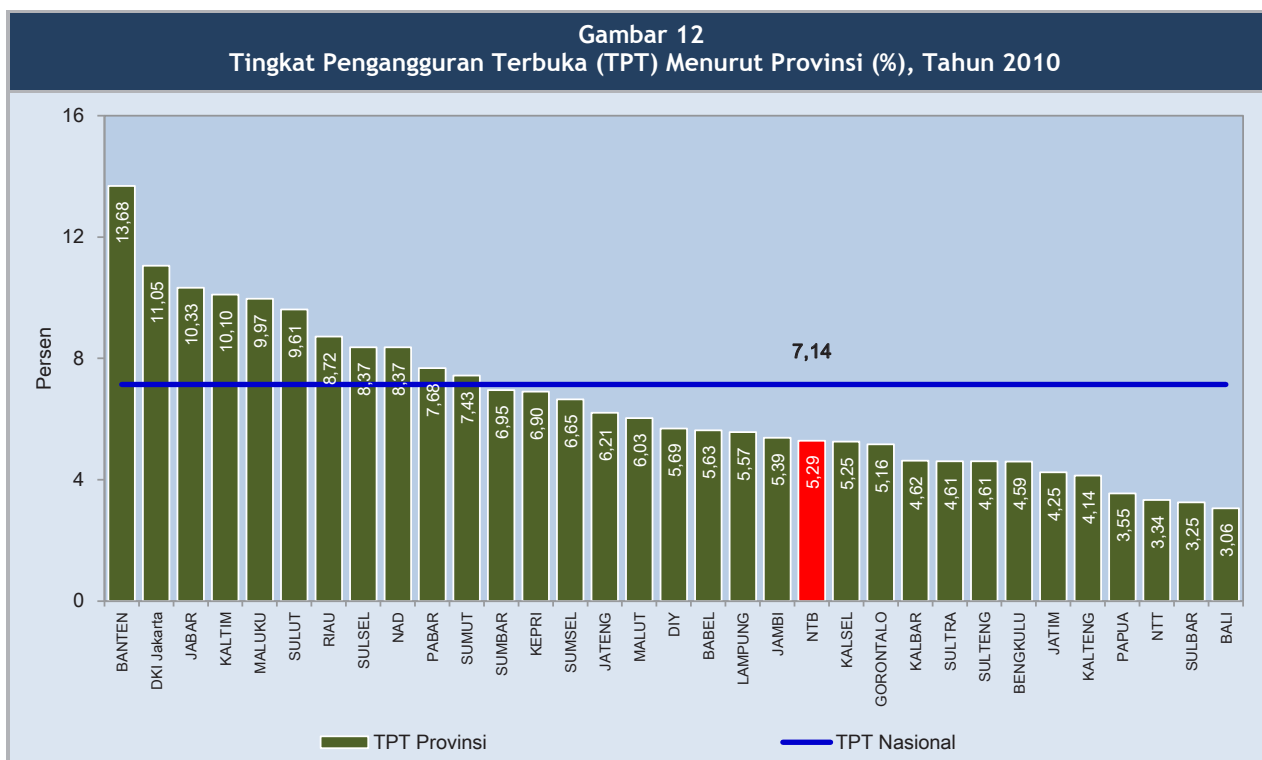
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 11
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

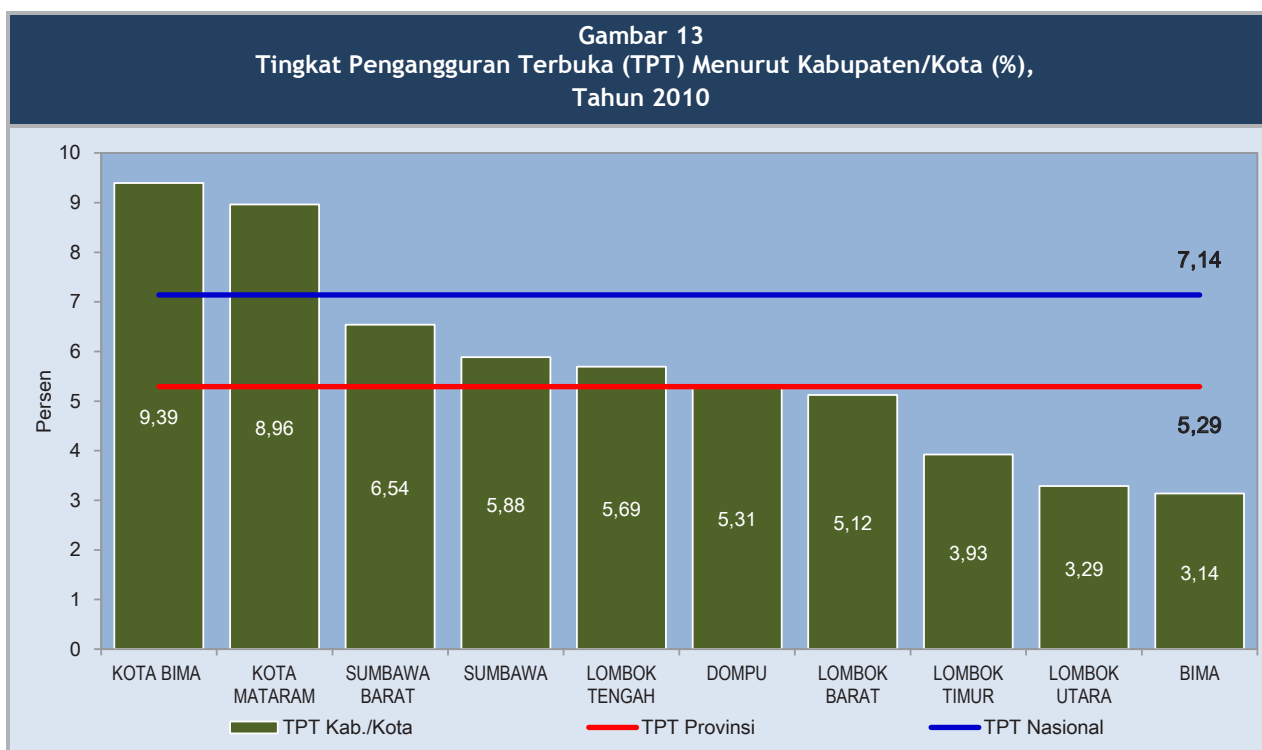


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

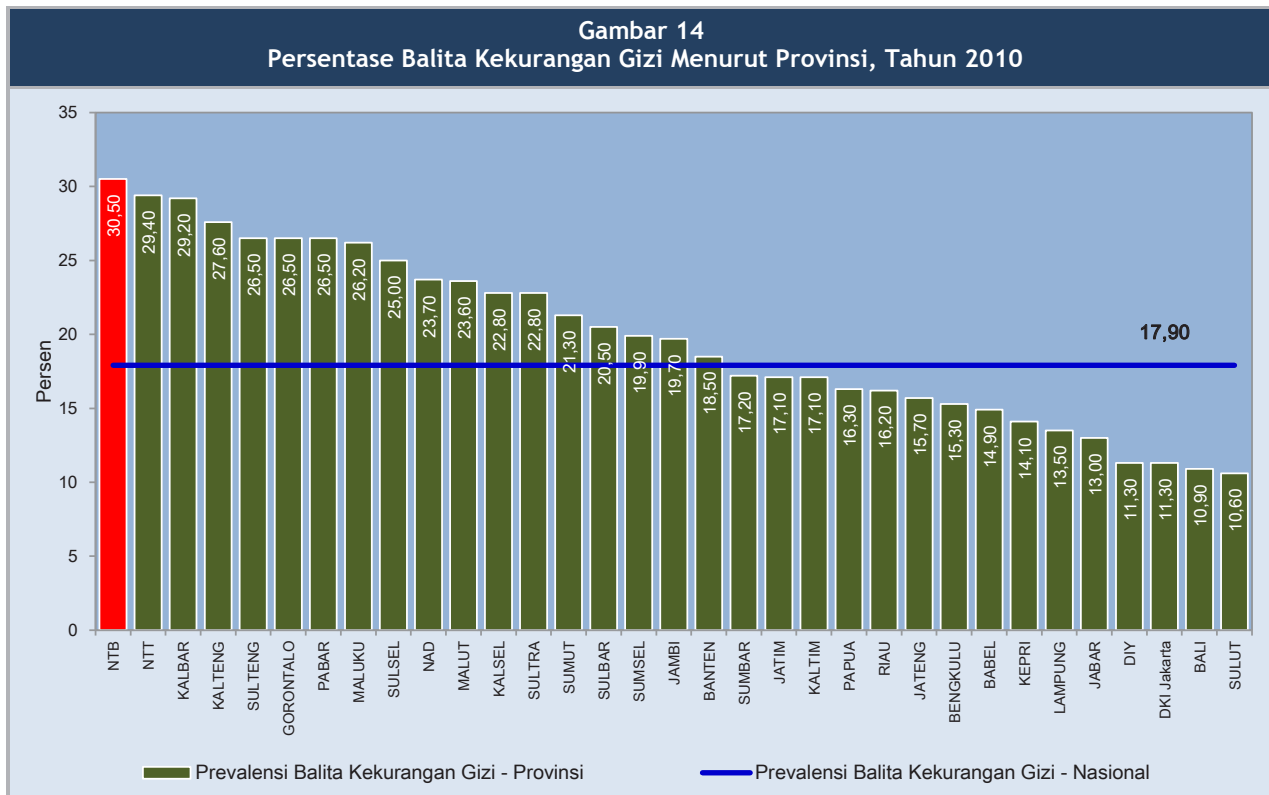
Tabel 3.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LOMBOK BARAT	67,94	61,14	2,80	1,67	30,28	17,47	69,73	70,05
LOMBOK TENGAH	72,46	69,38	8,49	9,58	38,28	50,98	76,14	82,62
LOMBOK TIMUR	70,76	66,02	11,40	10,27	46,14	51,76	82,02	82,40
SUMBAWA	66,61	66,48	6,61	9,22	35,70	42,12	69,40	68,09
DOMPU	64,08	64,21	7,28	8,61	35,13	41,64	73,23	68,40
BIMA	67,35	71,01	6,59	8,71	36,16	51,62	82,25	82,33
SUMBAWA BARAT	62,06	66,44	6,24	9,51	29,98	39,62	62,24	58,33
LOMBOK UTARA		64,41		6,49		49,24		80,35
KOTA MATARAM	64,53	67,59	1,74	3,26	13,52	20,76	45,31	40,35
KOTA BIMA	67,55	69,28	3,90	7,50	29,15	32,44	52,82	49,89
NUSA TENGGARA BARAT	68,66	66,63	7,01	7,82	35,66	42,14	72,62	73,39
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

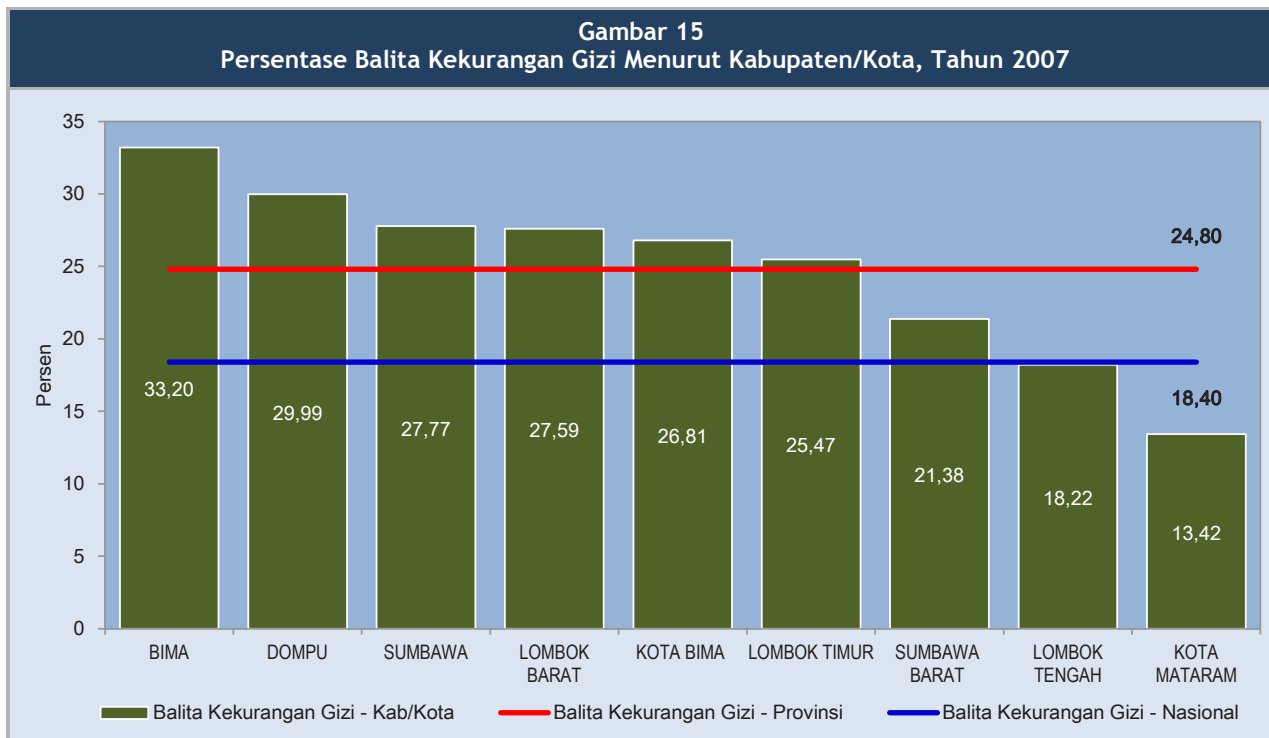
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

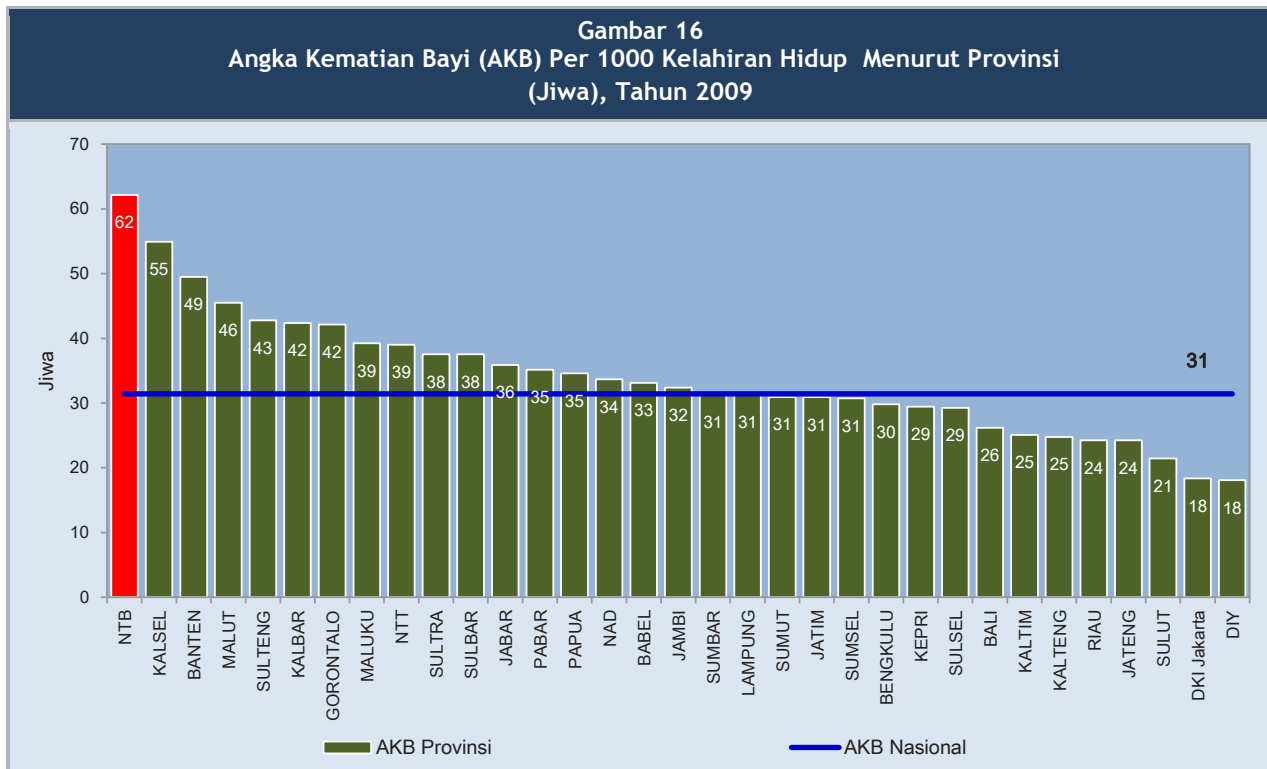


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

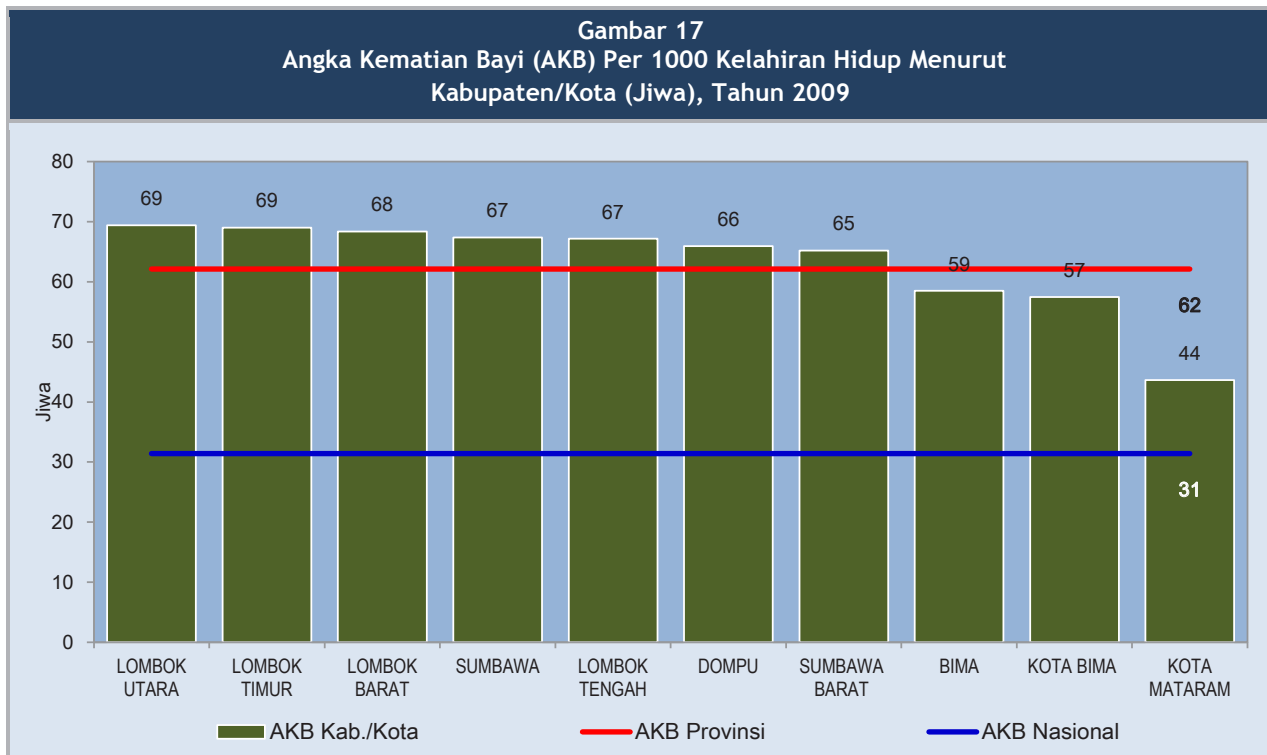


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

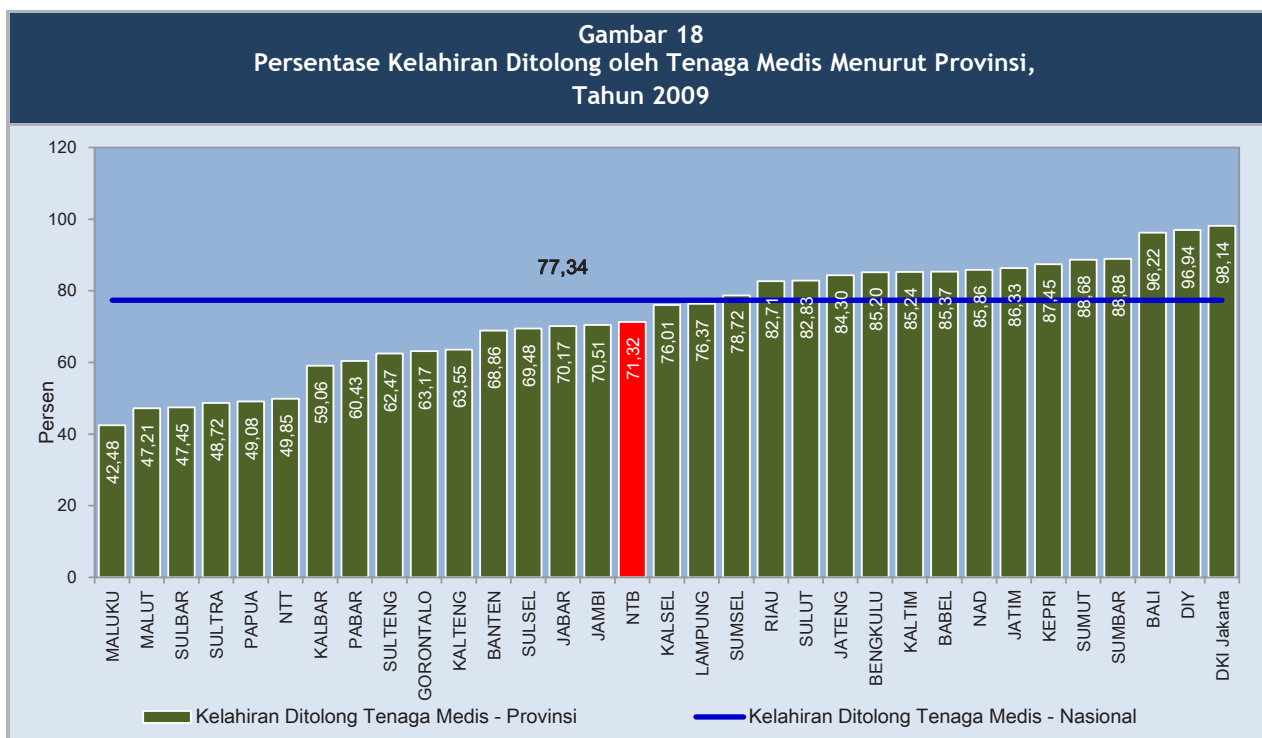


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

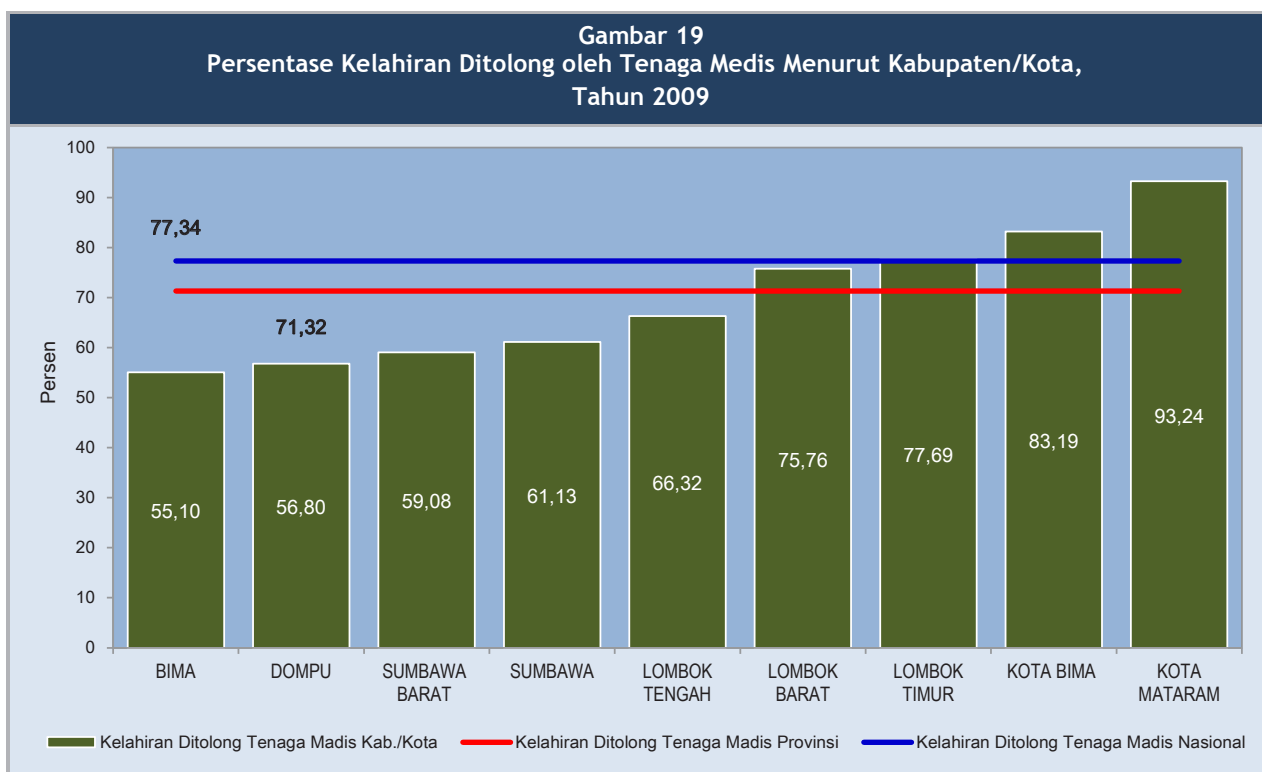


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

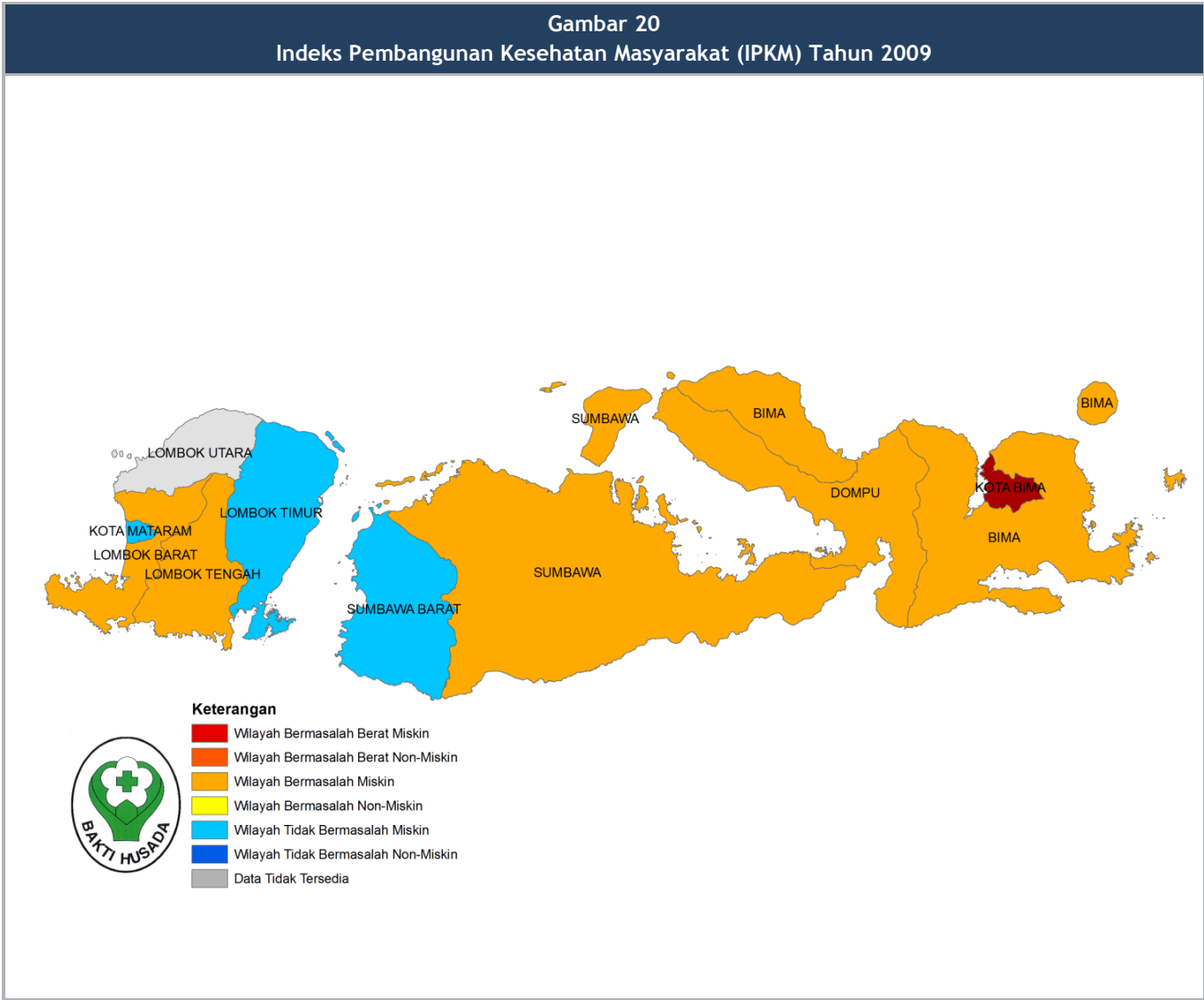
BIDANG KESEHATAN

Tabel 4.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
LOMBOK BARAT	25,46	14,87	5,63	59,47
LOMBOK TENGAH	43,53	26,71	6,01	59,69
LOMBOK TIMUR	46,90	21,97	6,05	68,88
SUMBAWA	39,34	17,11	6,68	78,74
DOMPU	40,68	23,86	5,54	84,36
BIMA	31,80	21,37	7,27	76,67
SUMBAWA BARAT	52,06	21,83	5,01	77,82
KOTA MATARAM	44,69	20,29	5,32	63,88
KOTA BIMA	42,83	21,57	5,83	68,82
NUSA TENGGARA BARAT	39,59	20,98	6,03	67,88
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

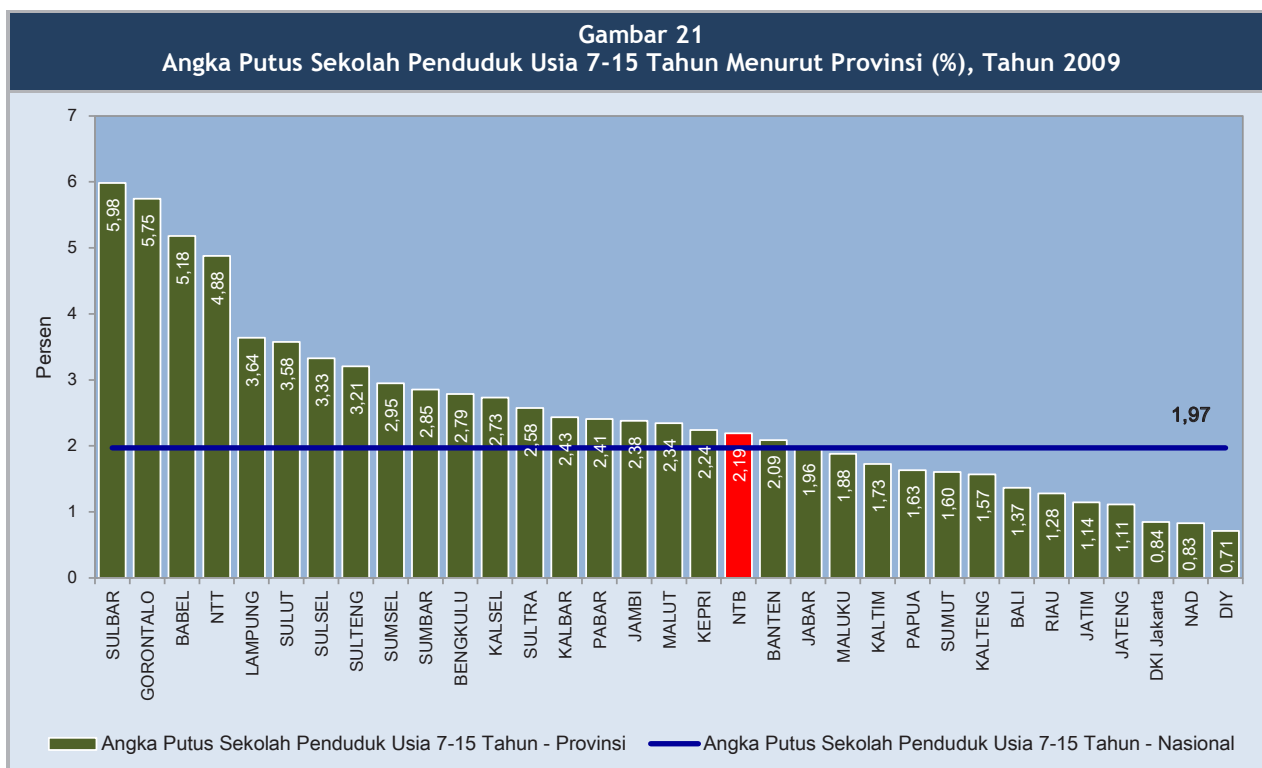
Tabel 5.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
LOMBOK BARAT	KaC	296	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
LOMBOK TENGAH	KaC	286	0,47	Kabupaten Bermasalah Miskin
LOMBOK TIMUR	KaE	237	0,50	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
SUMBAWA	KaC	303	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
DOMPU	KaC	336	0,44	Kabupaten Bermasalah Miskin
BIMA	KaC	284	0,47	Kabupaten Bermasalah Miskin
SUMBAWA BARAT	KaE	234	0,50	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
MATARAM	KoE	48	0,63	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA BIMA	KoA	252	0,49	Kota Bermasalah Berat Miskin

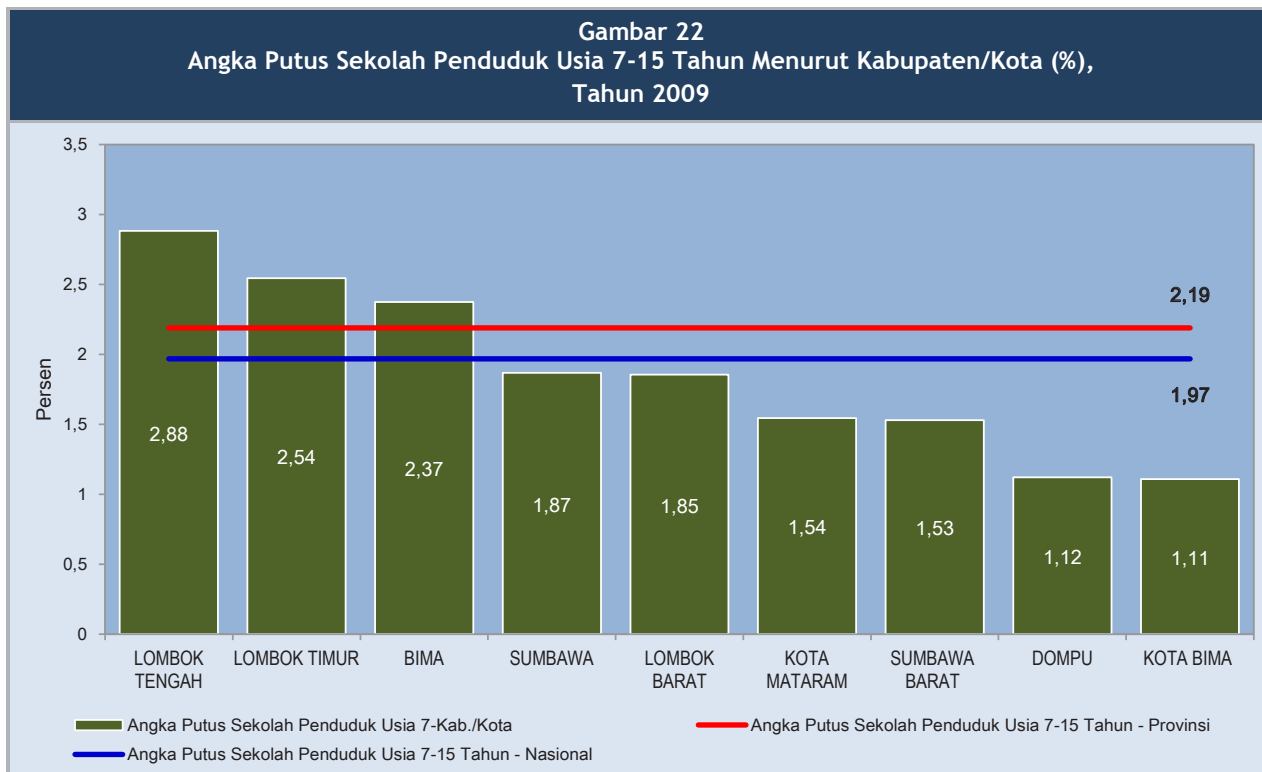
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

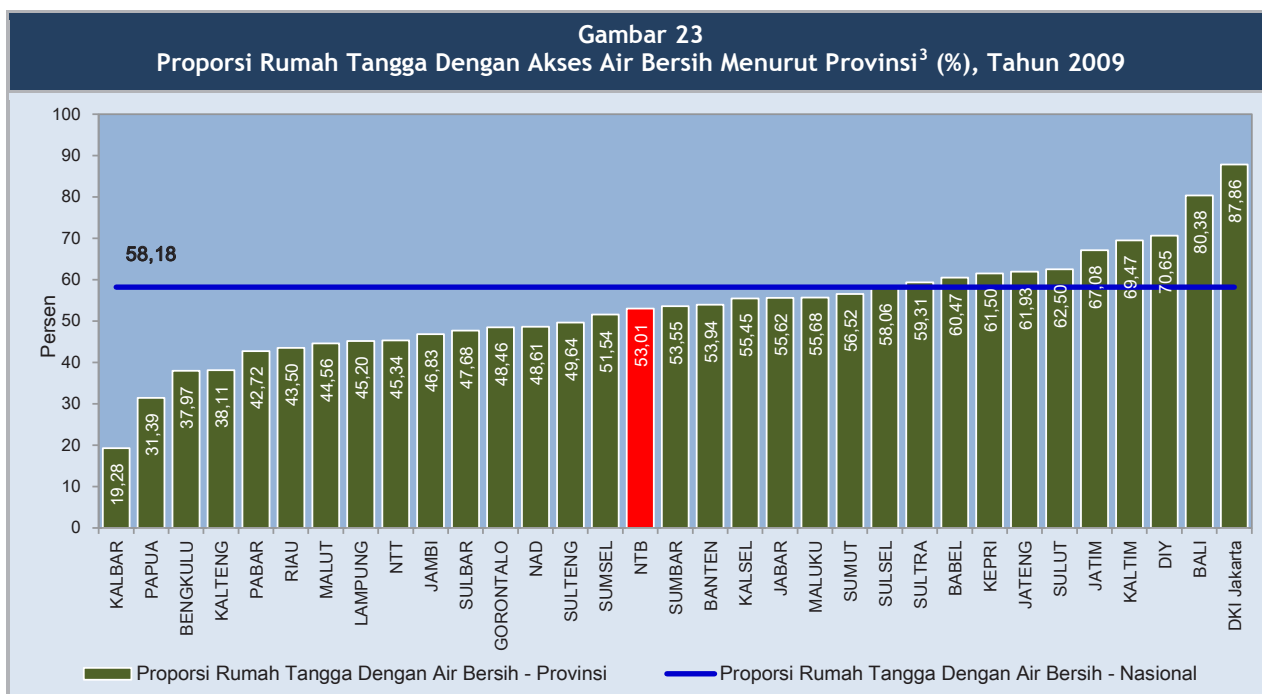
BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 6.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

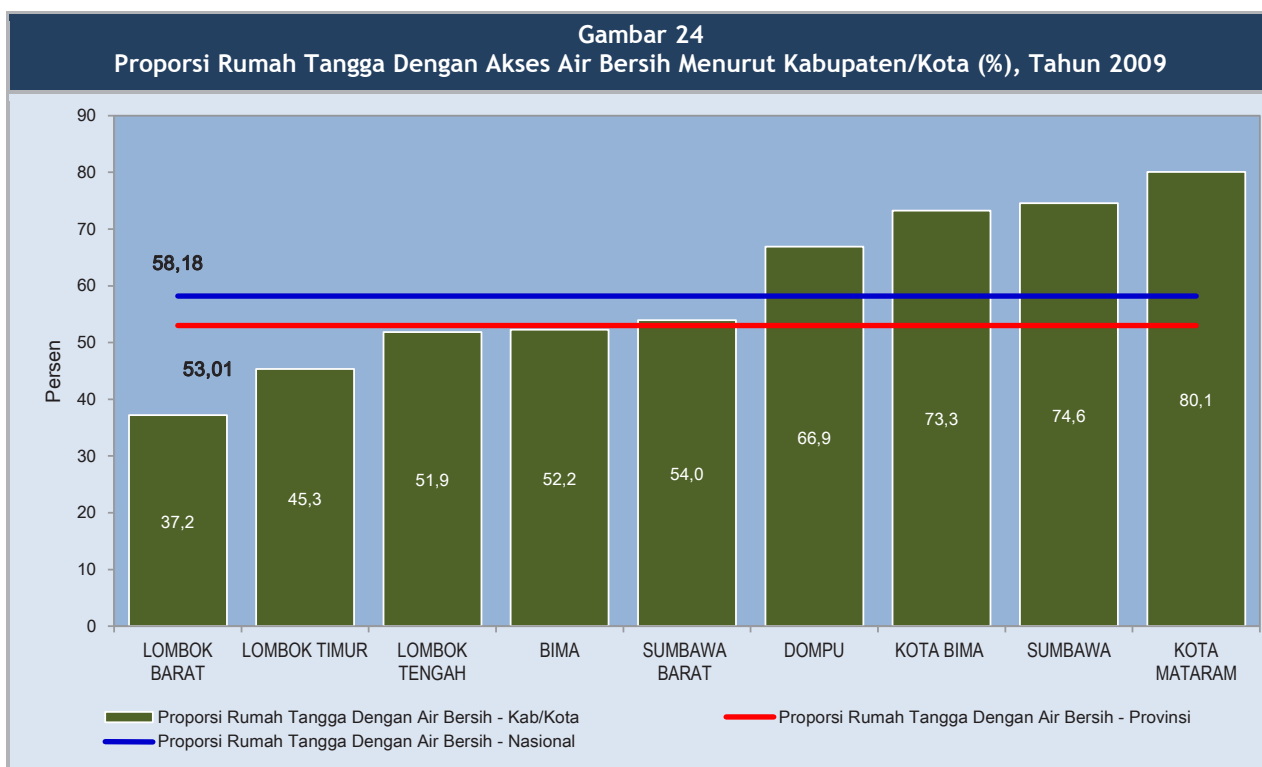
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
LOMBOK BARAT	105,08	95,92	84,77	71,86	48,20	39,33
LOMBOK TENGAH	108,96	94,43	81,93	69,62	70,51	58,94
LOMBOK TIMUR	108,90	95,80	79,20	65,04	43,65	35,26
SUMBAWA	109,88	96,94	85,71	76,56	66,78	47,62
DOMPU	111,28	90,20	111,59	77,58	65,05	55,06
BIMA	106,41	90,96	106,88	81,44	70,86	57,91
SUMBAWA BARAT	104,62	90,97	91,98	70,64	81,27	56,24
KOTA MATARAM	107,36	98,06	80,20	75,61	72,57	57,96
KOTA BIMA	113,50	90,82	76,02	62,19	123,62	74,76
NUSA TENGGARA BARAT	108,06	94,75	85,94	71,32	60,79	48,51
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



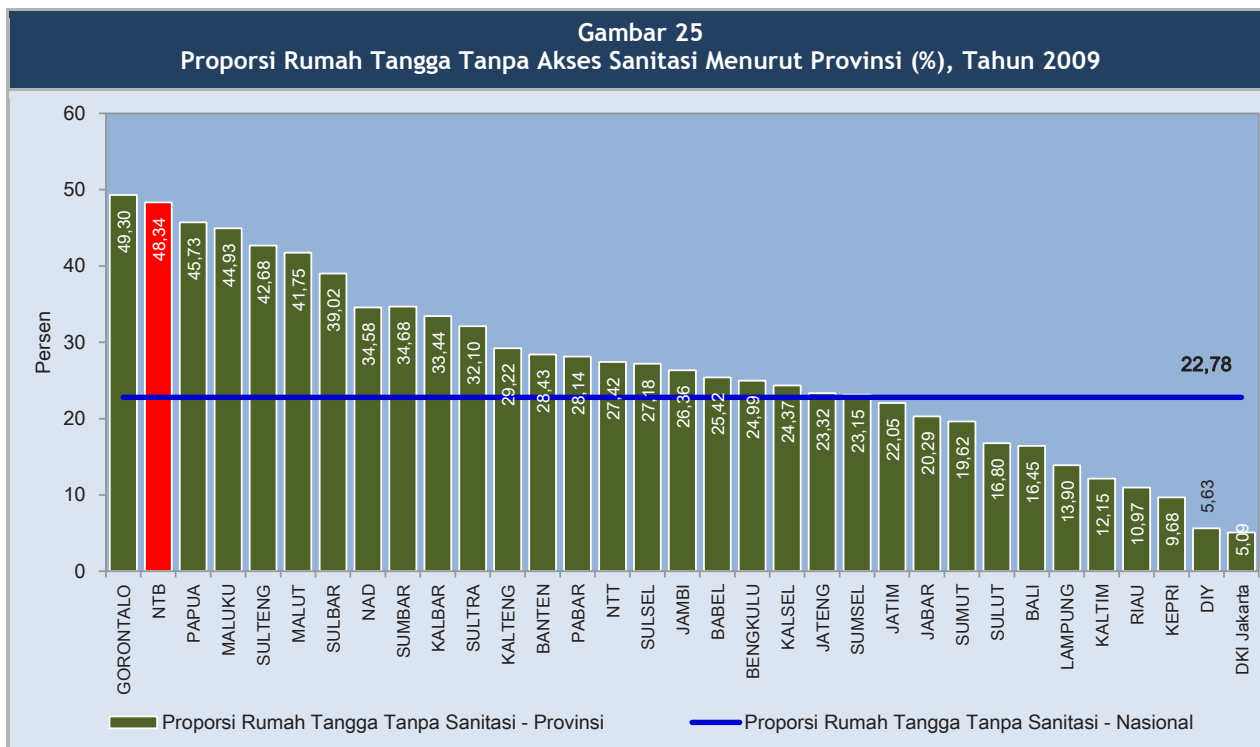
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



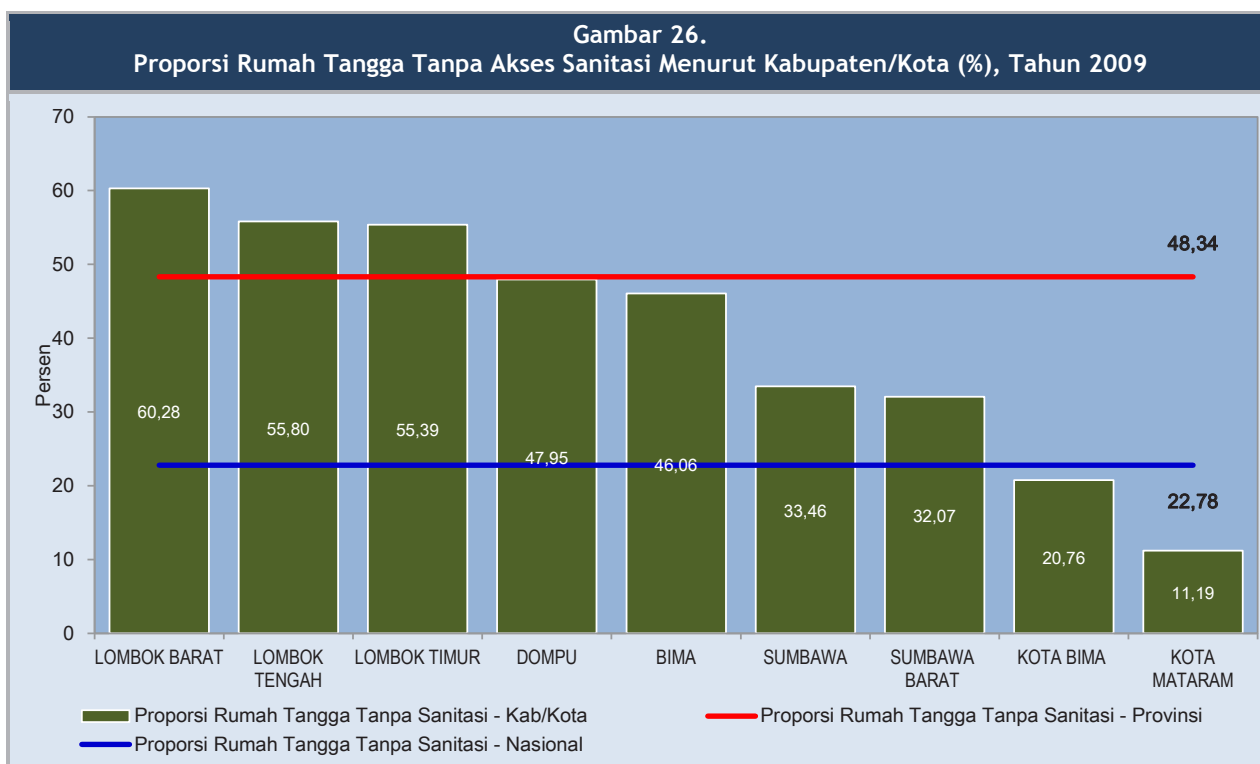
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

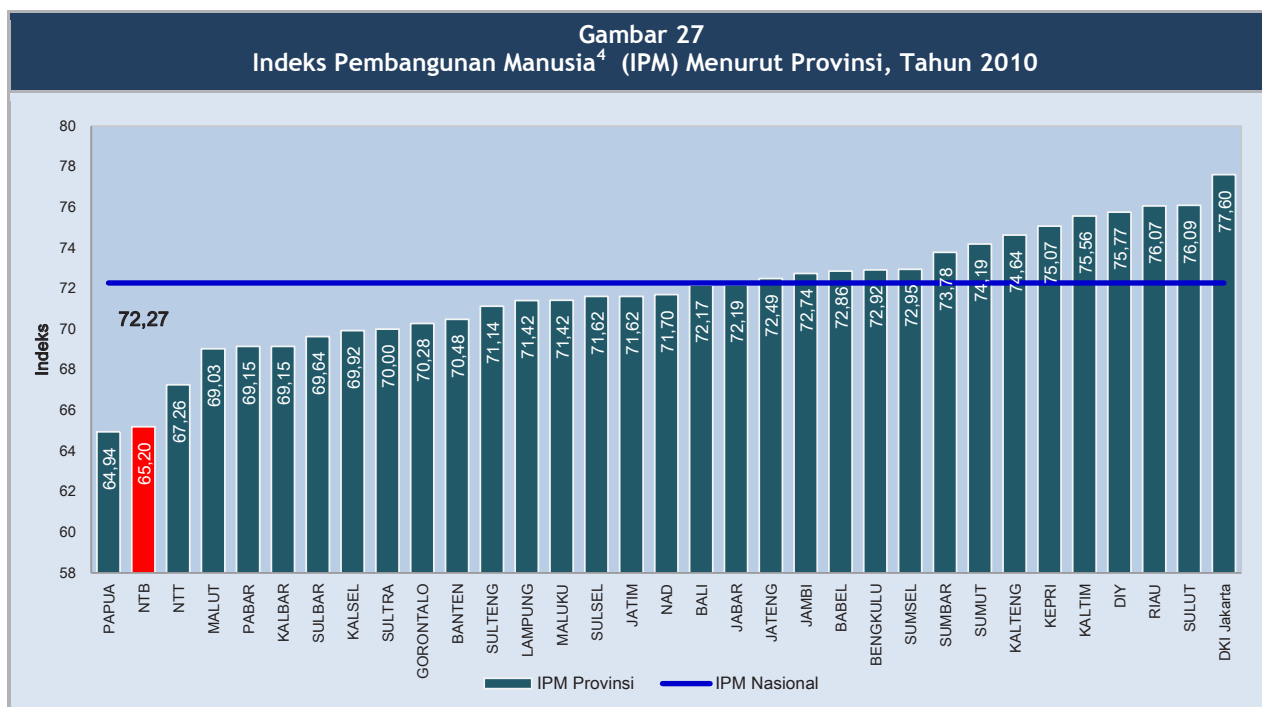


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

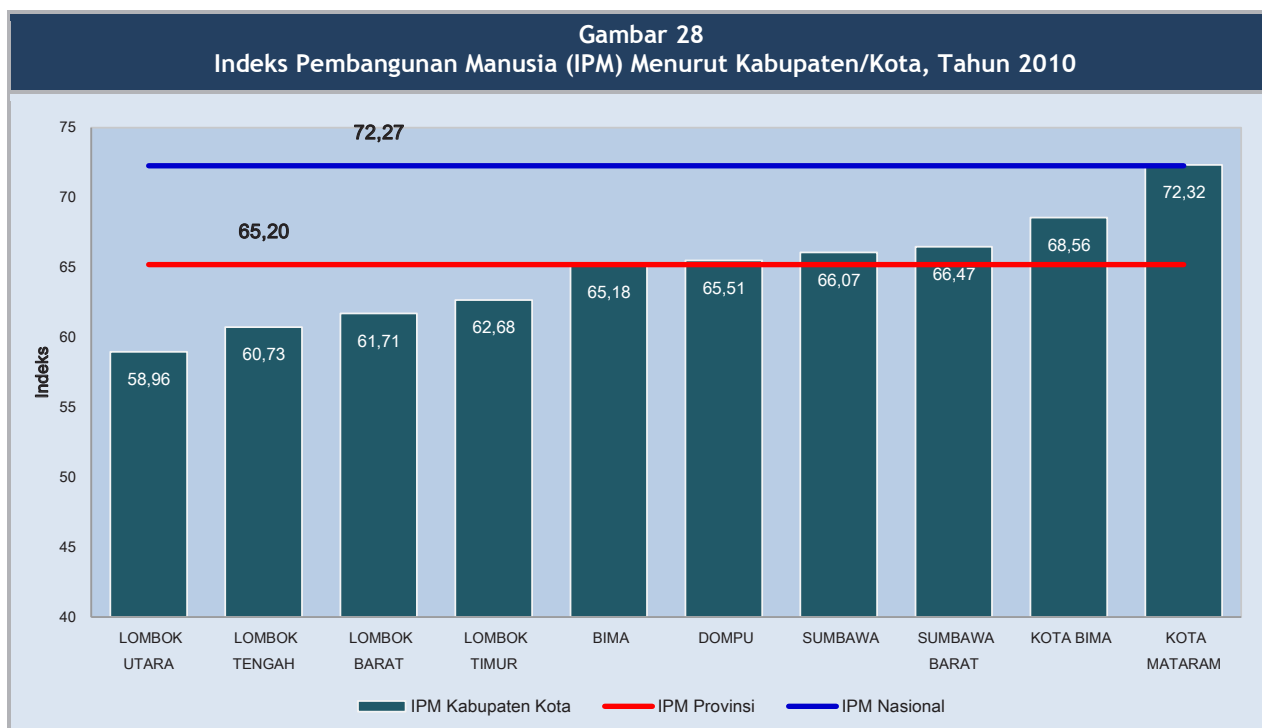


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

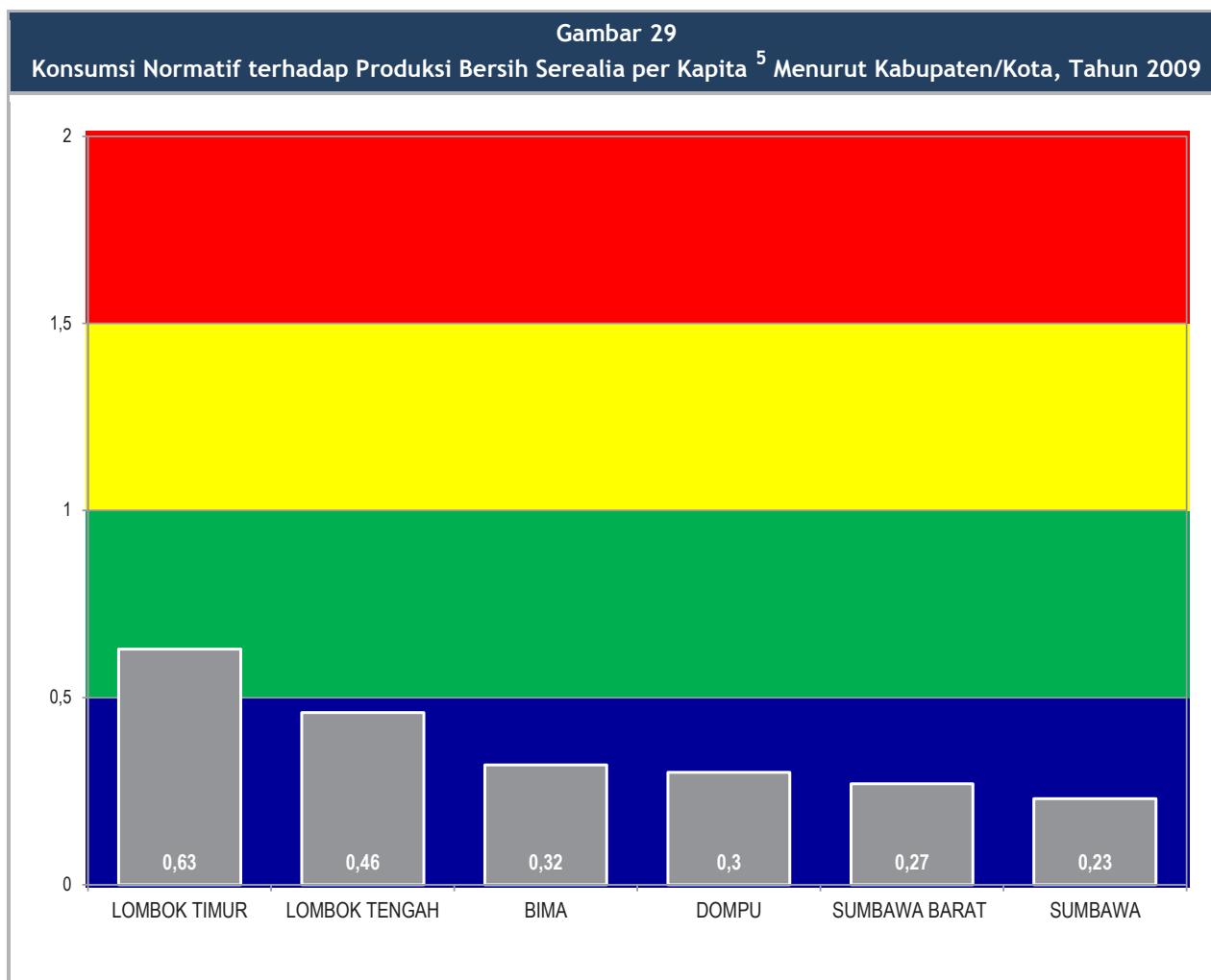
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 7.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
LOMBOK BARAT	60,40	60,84	76,41	76,42	5,87	5,89	623,21	625,47	61,27	61,71
LOMBOK TENGAH	60,66	61,09	71,20	71,48	5,64	5,65	625,37	627,56	60,26	60,73
LOMBOK TIMUR	60,26	60,75	79,92	80,02	6,33	6,33	621,85	624,06	62,21	62,68
SUMBAWA	60,61	60,72	89,75	89,78	7,12	7,21	628,99	631,70	65,72	66,07
DOMPU	60,94	61,05	82,82	83,69	7,20	7,32	635,53	638,52	64,93	65,51
BIMA	62,62	62,93	85,83	85,87	7,24	7,26	612,72	615,04	64,81	65,18
SUMBAWA BARAT	61,11	61,28	90,72	90,75	7,16	7,23	627,86	629,89	66,16	66,47
LOMBOK UTARA	60,18	60,56	71,01	71,27	4,98	5,17	611,71	613,55	58,40	58,96
KOTA MATARAM	66,15	66,64	91,81	91,82	9,20	9,21	642,17	645,13	71,82	72,32
KOTA BIMA	62,86	62,98	92,84	93,74	9,25	9,39	613,14	615,28	68,02	68,56
NUSA TENGGARA BARAT	61,80	62,11	80,18	81,05	6,73	6,77	637,98	639,89	64,66	65,20
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Nusa Tenggara Barat Dalam Angka (BPS), 2010.

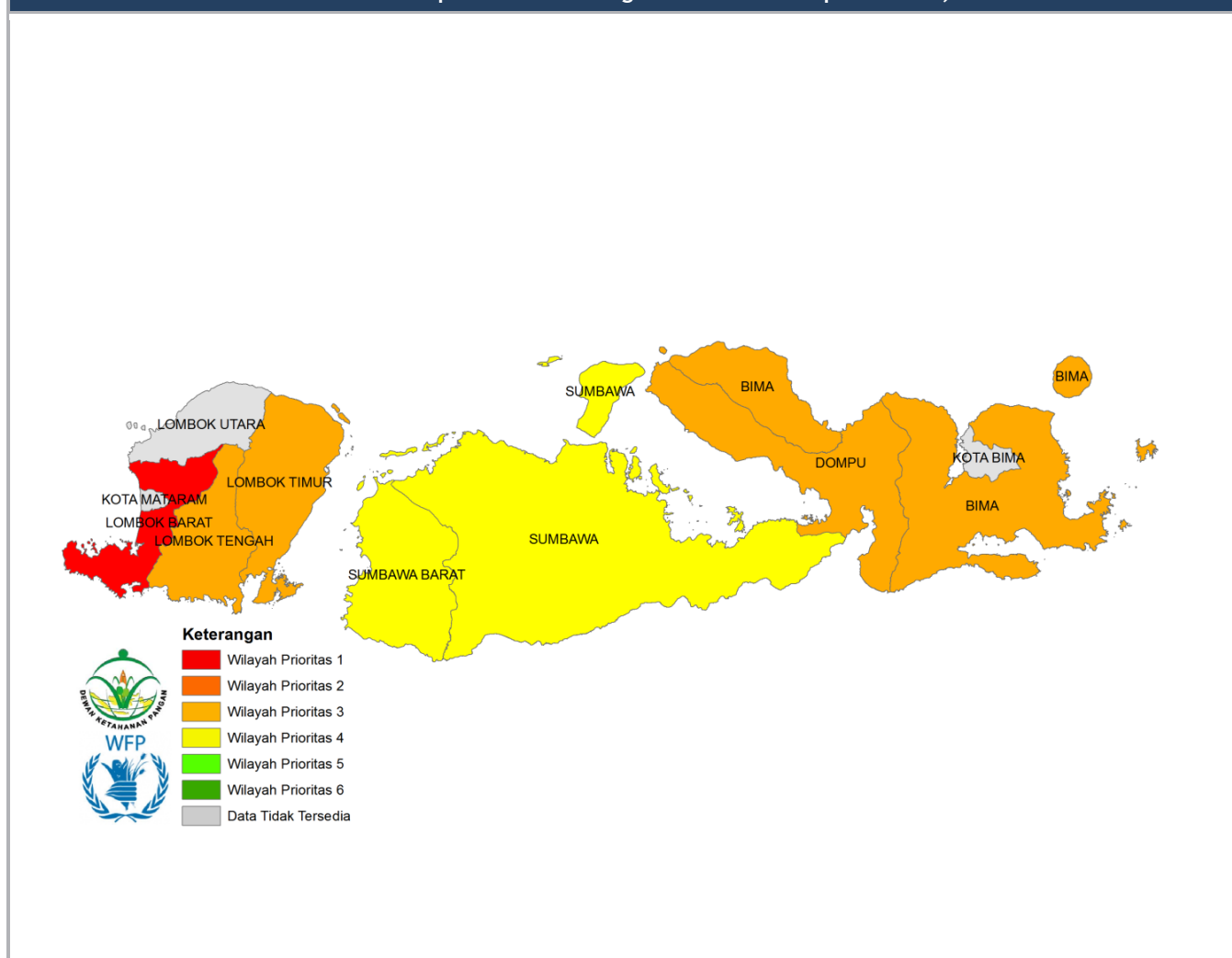
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 30
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

KETAHANAN PANGAN

Tabel 8.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Sereal- Kab./Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif- Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
LOMBOK BARAT	442	0,68	24,02	28,47	0,83	30,82	60,40	35,3	3,31	62,82	216,0
LOMBOK TENGAH	655	0,46	20,94	24,71	0,00	35,92	60,66	24,4	2,42	48,15	177,0
LOMBOK TIMUR	478	0,63	23,96	31,51	0,00	26,20	60,26	32,6	0,84	54,66	164,8
SUMBAWA	1.279	0,23	23,85	15,67	0,00	15,86	60,61	32,1	6,06	25,43	200,4
DOMPU	991	0,3	21,76	25,42	0,00	19,97	60,94	37,5	0,00	33,09	124,3
BIMA	934	0,32	20,42	21,08	0,00	17,94	62,62	41,2	3,95	47,76	208,0
SUMBAWA BARAT	1.098	0,27	23,01	4,55	0,00	13,61	61,11	27,5	8,16	46,04	219,8
LOMBOK UTARA							60,18				48,3
KOTA MATARAM			15,41	0,42	0,00	15,51	66,15	17,7	0,00	19,90	91,8
KOTA BIMA			13,65	14,37	0,00	8,11	62,86	34,3	0,00	26,72	97,0

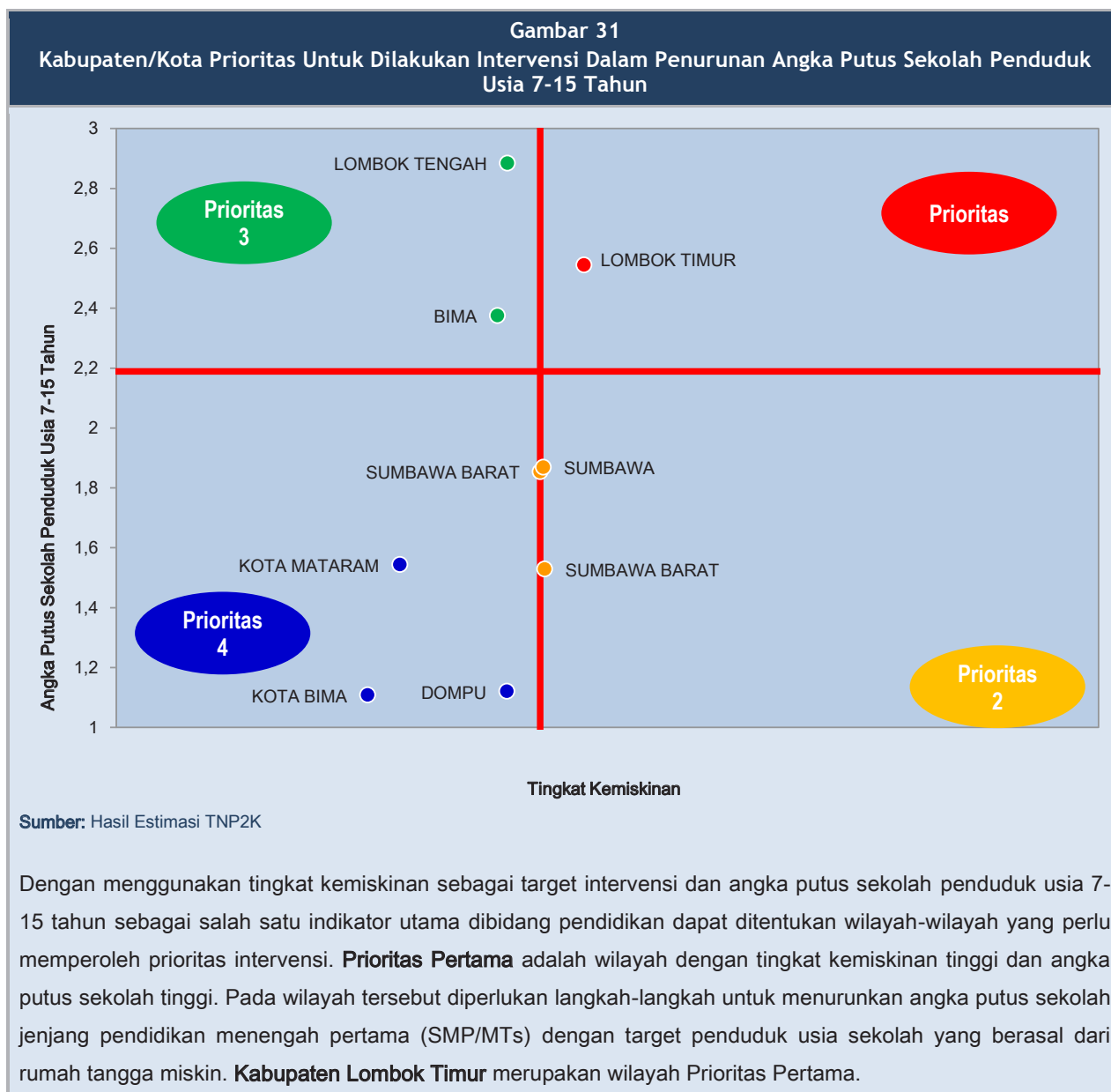
Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

Keterangan: *Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/timbah

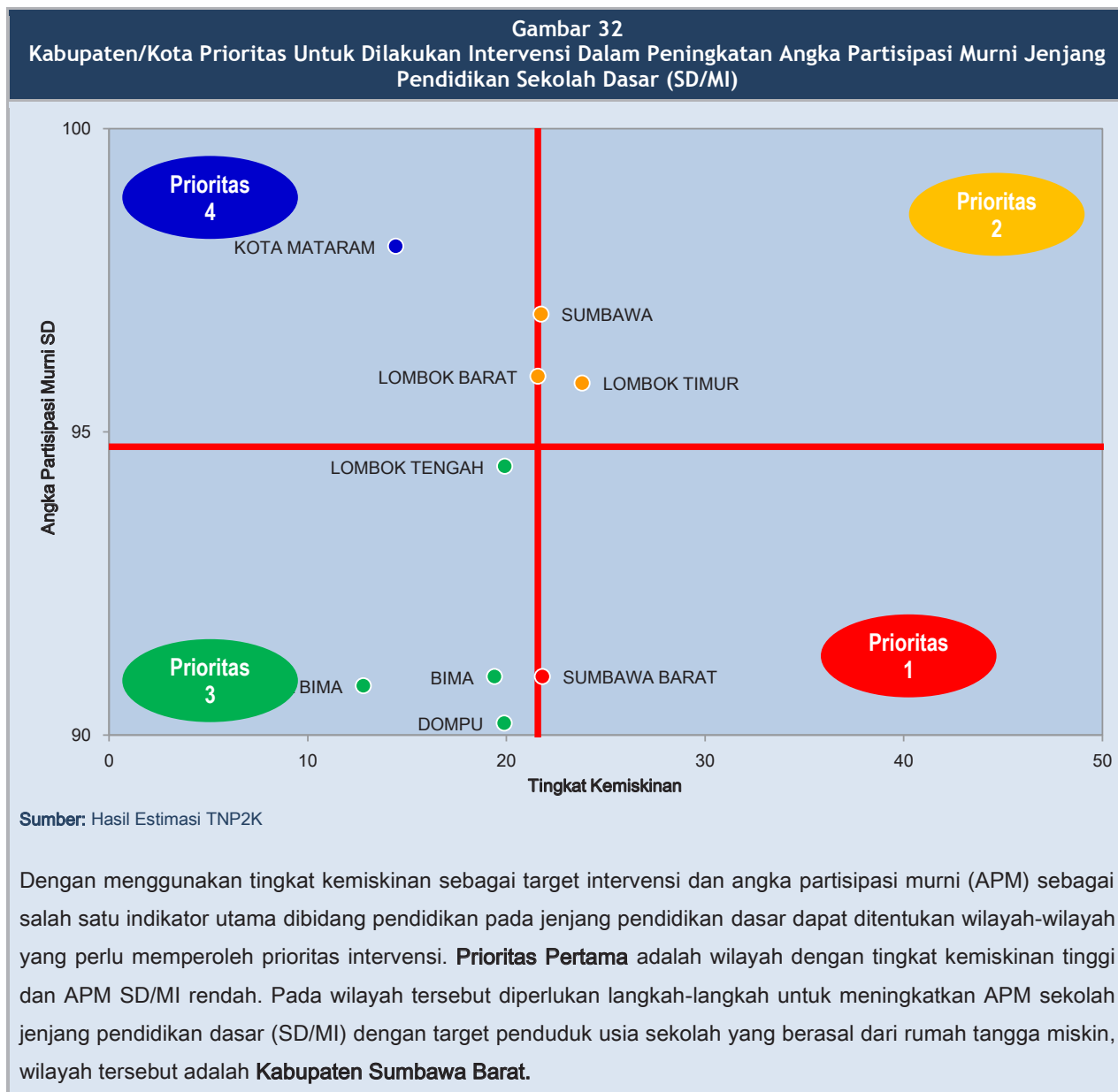
** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

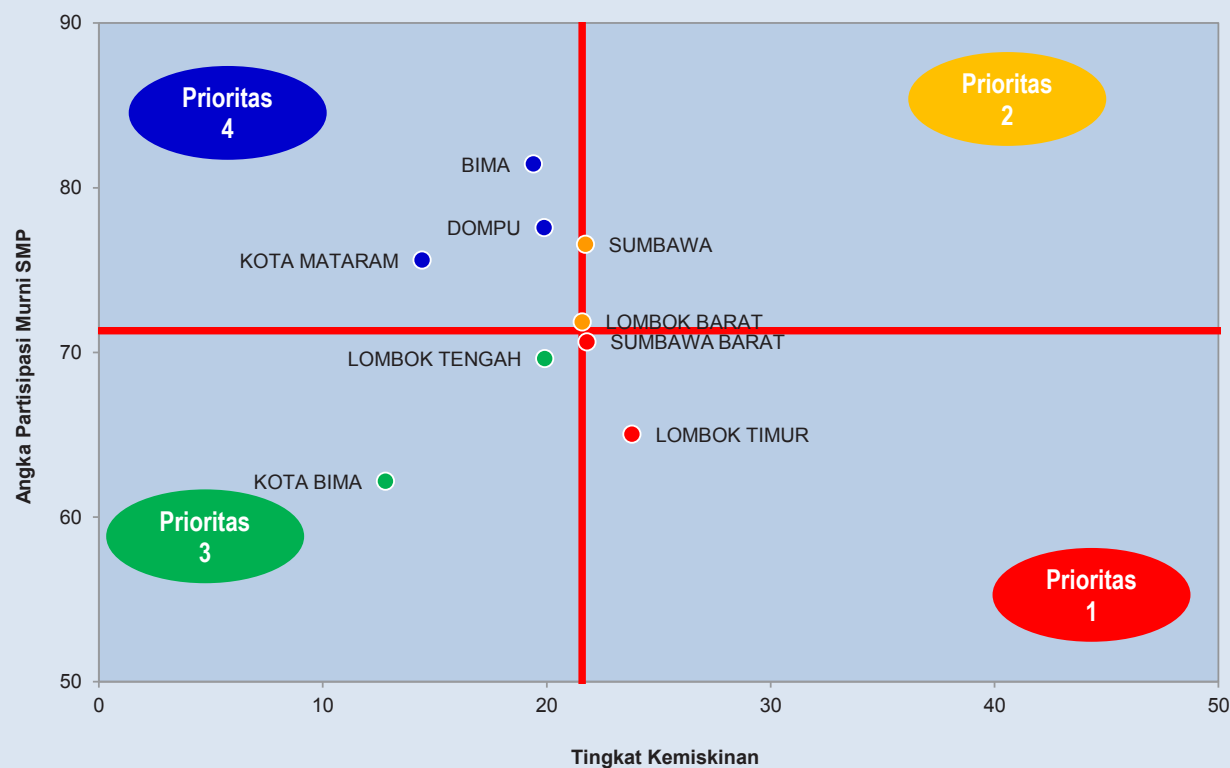


PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

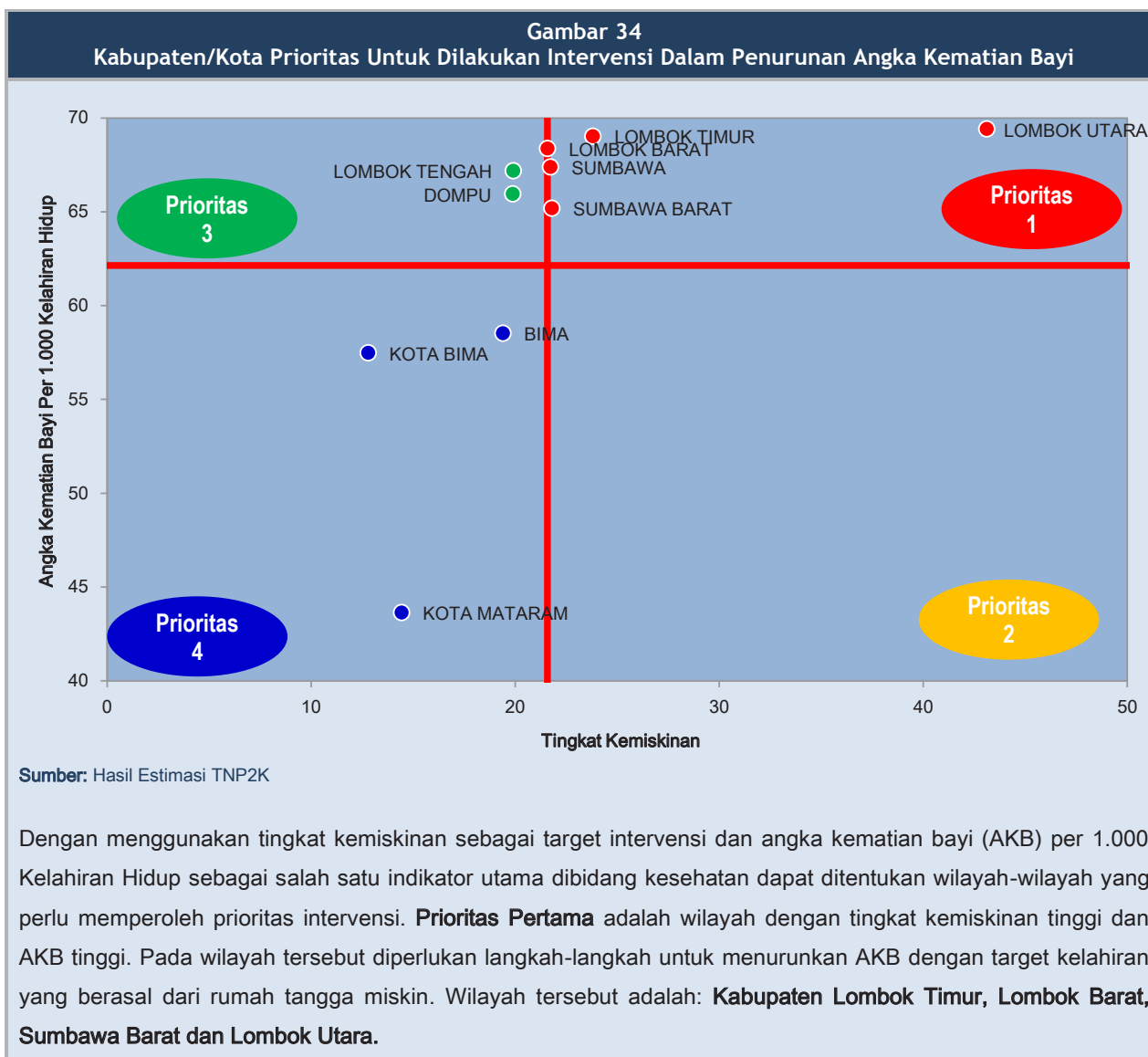
Gambar 33
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama



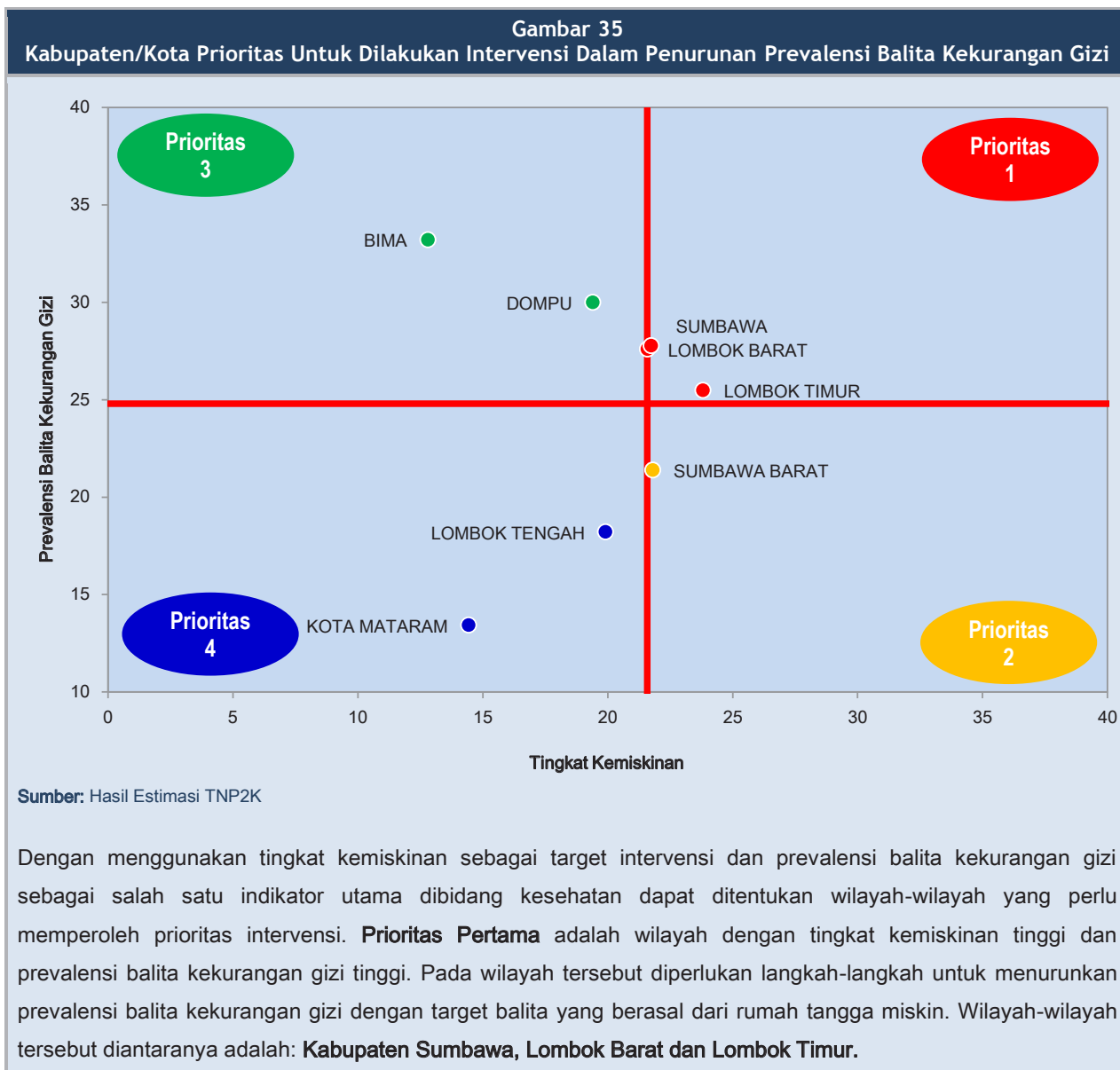
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur**.

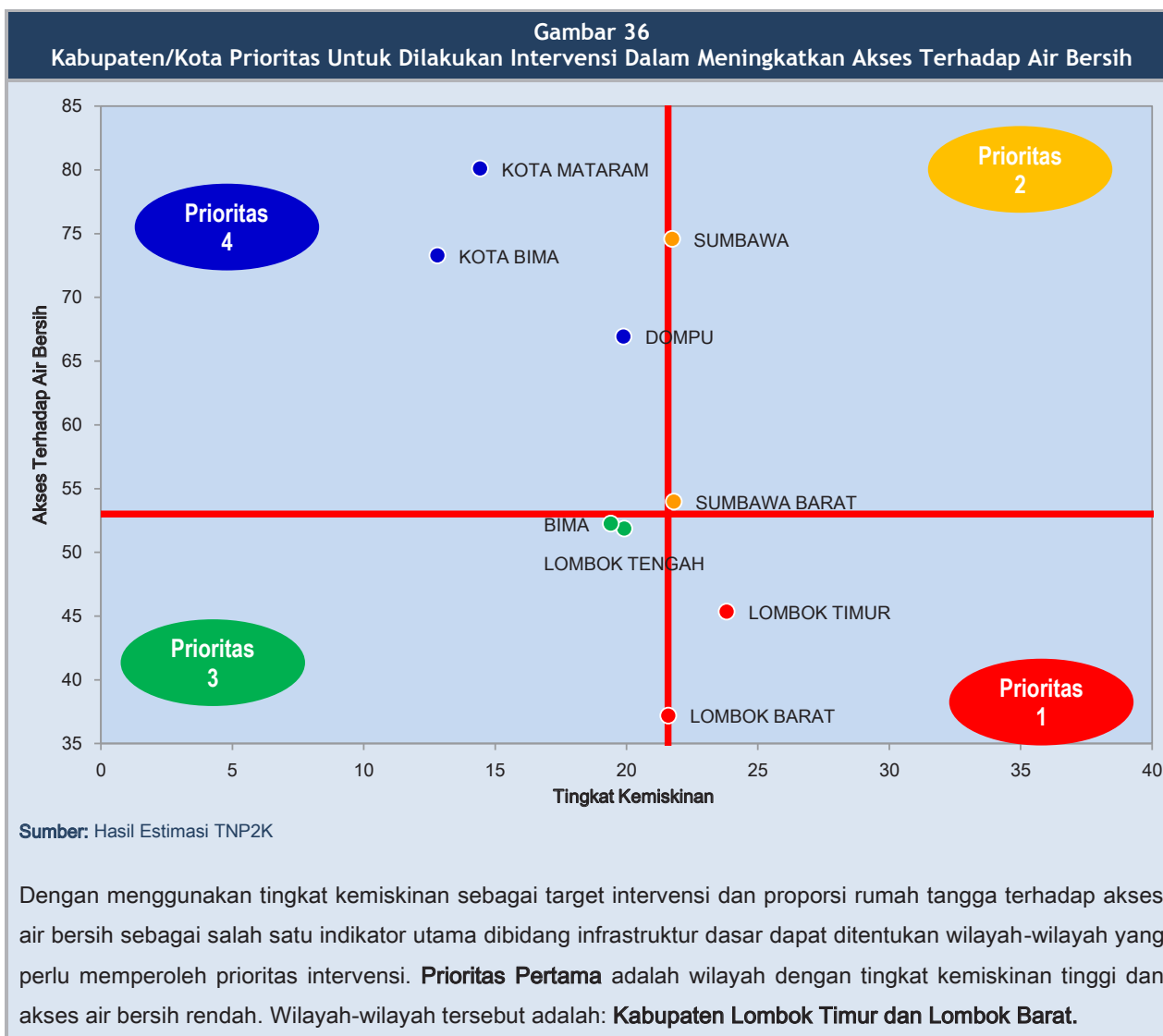
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



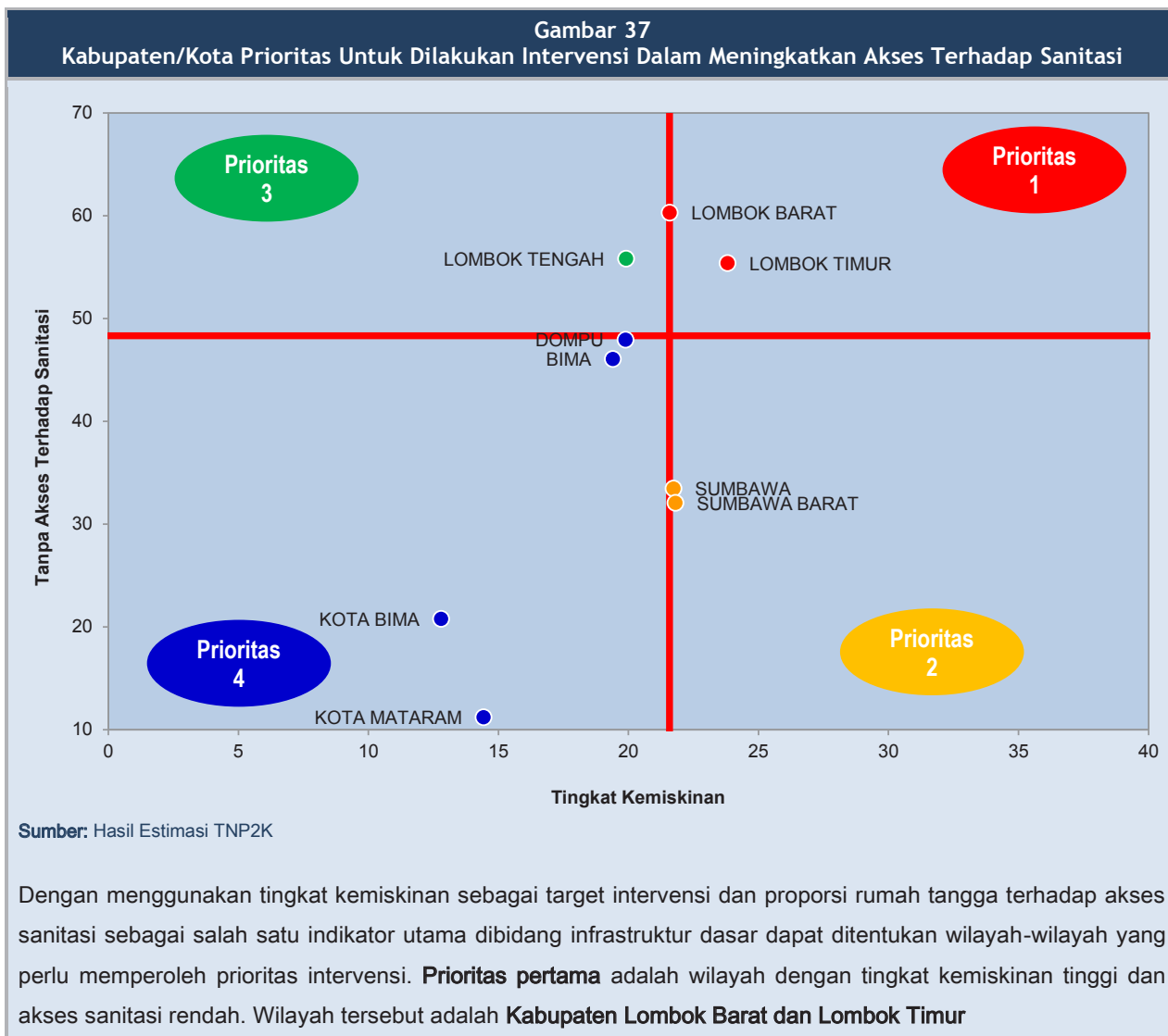
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



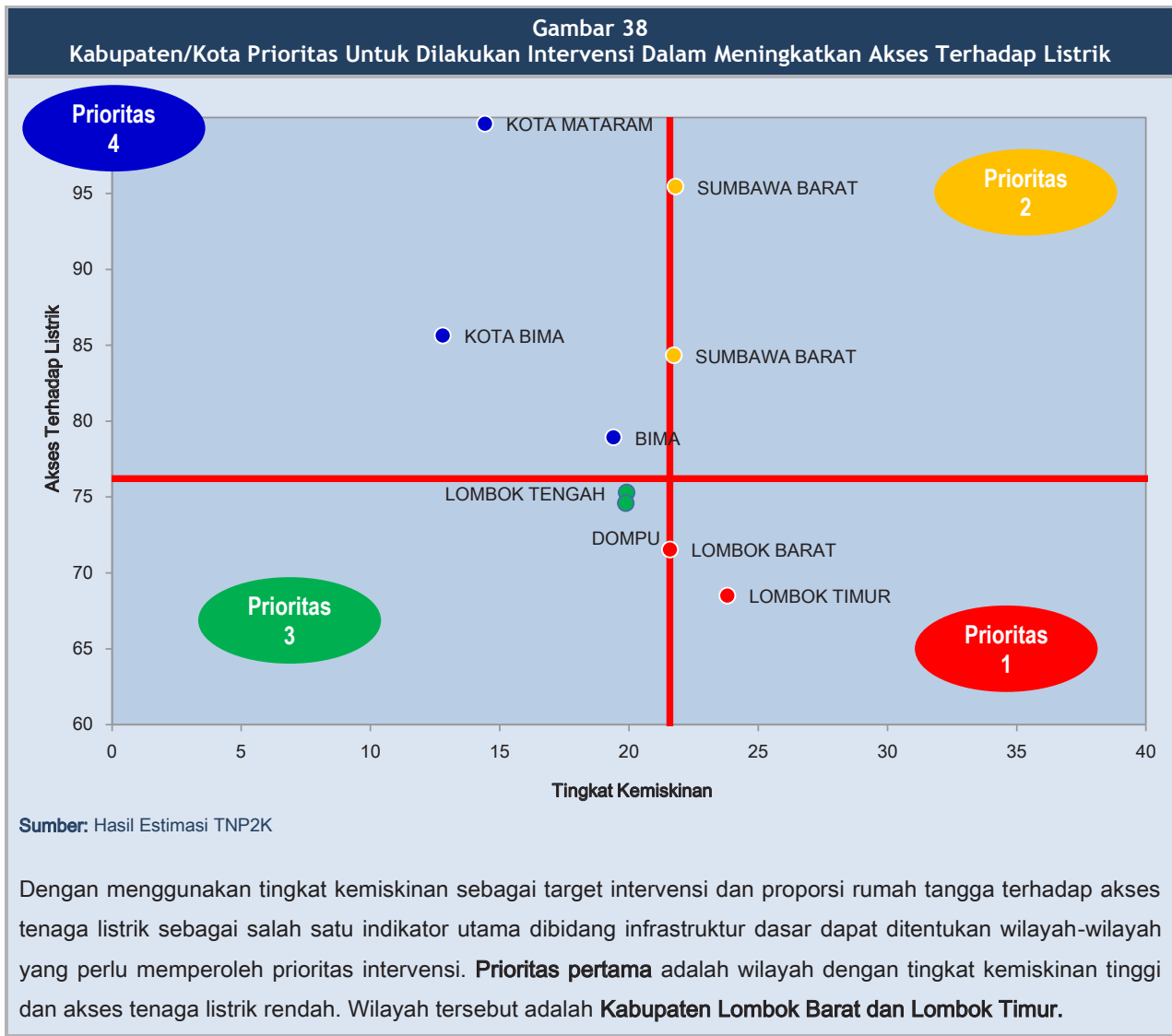
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



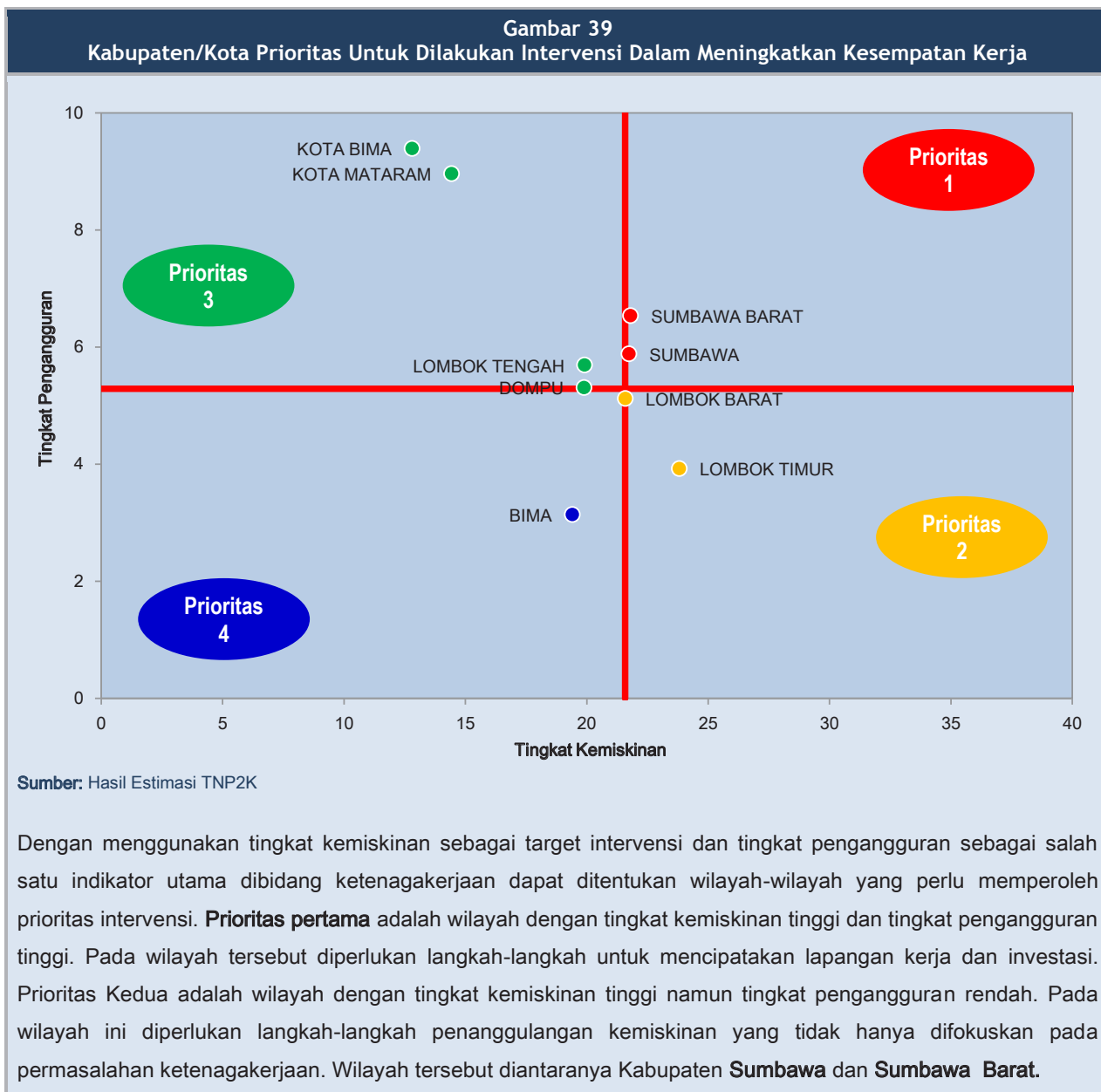
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

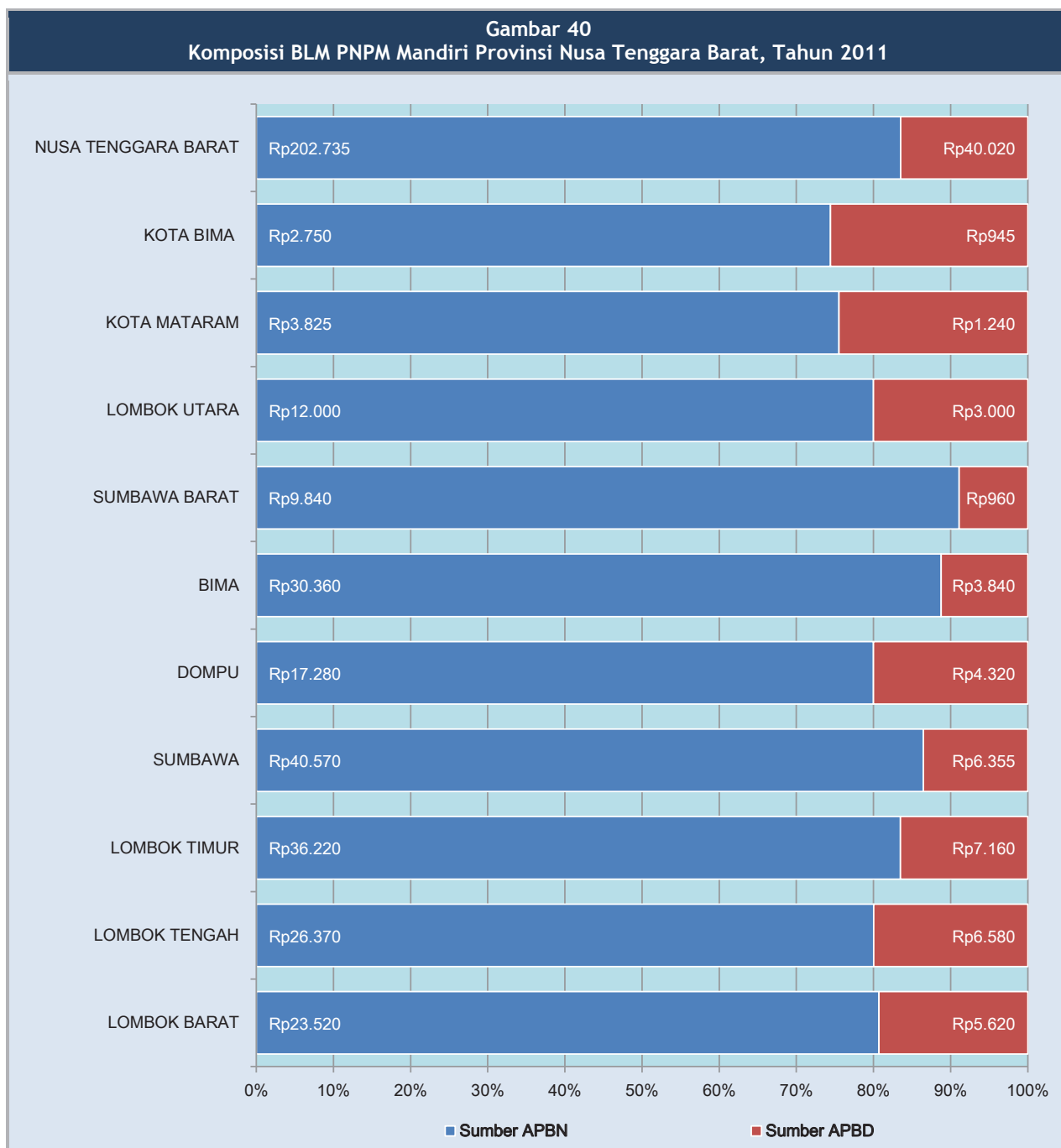


Tabel 9
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota⁷

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengangguran
LOMBOK TIMUR	1	2	1	1	1	1	1	1	2
LOMBOK BARAT	2	2	2	1	1	1	1	1	2
LOMBOK UTARA				1					2
SUMBAWA BARAT	2	1	1	1	2	2	2	2	1
SUMBAWA	2	2	2	1	1	2	2	2	1
LOMBOK TENGAH	3	3	3	3	4	3	3	3	3
DOMPU	4	3	4	3	3	4	4	3	3
BIMA	3	3	4	4	3	3	4	4	4
KOTA BIMA	4	3	3	4	3	4	4	4	3
KOTA MATARAM	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

⁷ Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

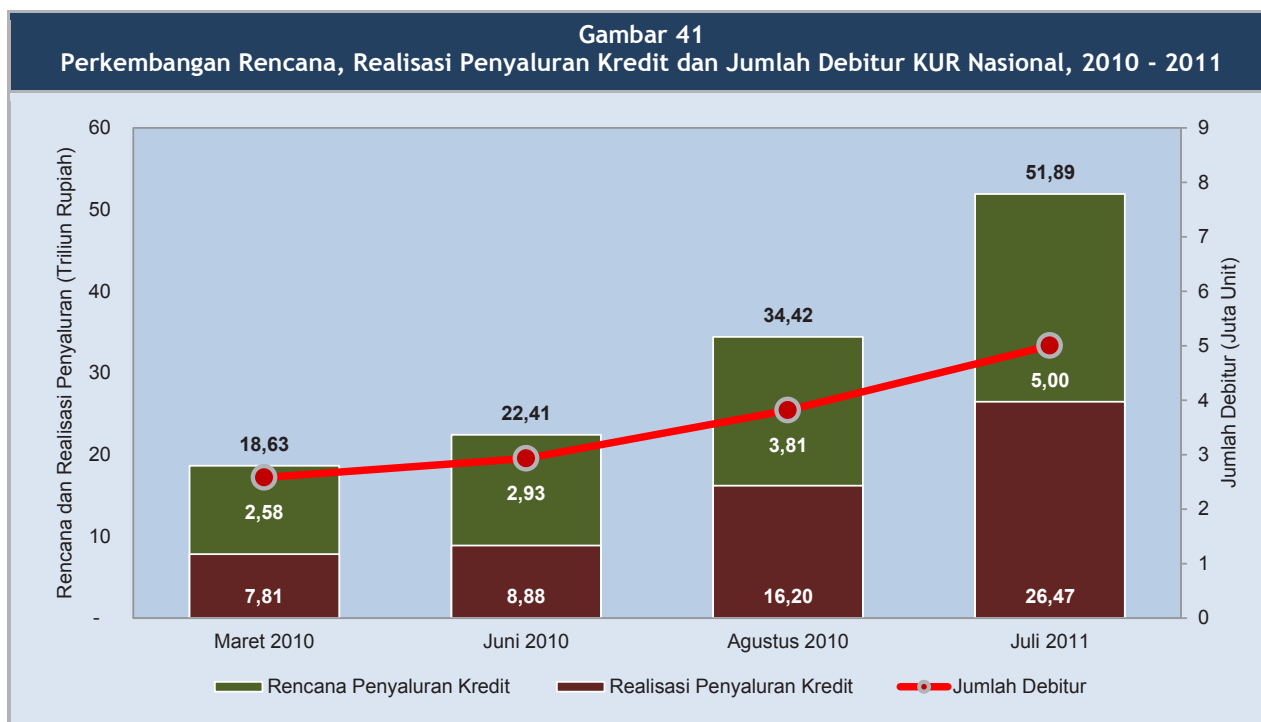
PNPM MANDIRI

Tabel 10.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

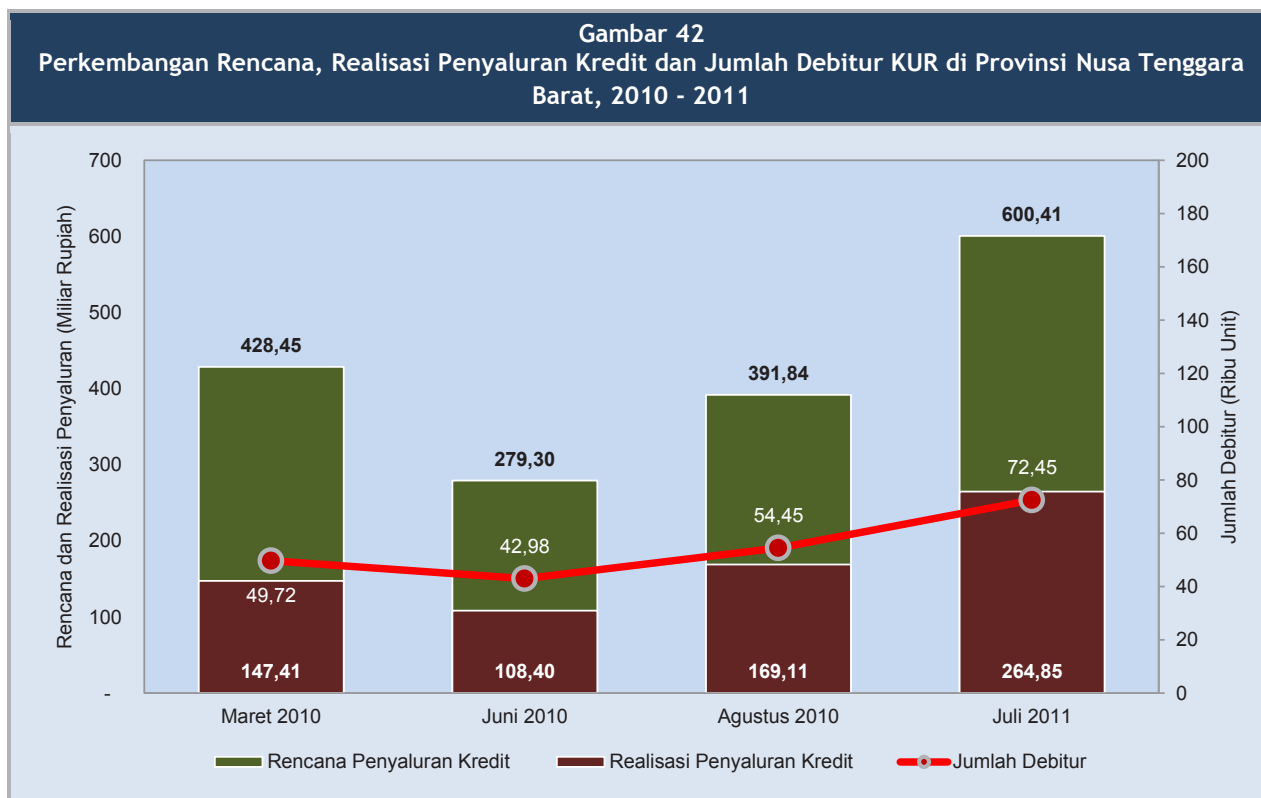
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM PISEW	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
LOMBOK BARAT	24.000	5.140		29.140	23.520	5.620	10
LOMBOK TENGAH	27.600	5.350		32.950	26.370	6.580	12
LOMBOK TIMUR	24.600	11.280	7.500	43.380	36.220	7.160	20
SUMBAWA	29.850	2.075	15.000	46.925	40.570	6.355	24
DOMPU	21.600			21.600	17.280	4.320	8
BIMA	19.200		15.000	34.200	30.360	3.840	18
SUMBAWA BARAT	4.800		6.000	10.800	9.840	960	8
LOMBOK UTARA	15.000			15.000	12.000	3.000	5
KOTA MATARAM		5.065		5.065	3.825	1.240	6
KOTA BIMA		3.695		3.695	2.750	945	5
NUSA TENGGARA BARAT	166.650	32.605	43.500	242.755	202.735	40.020	116

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

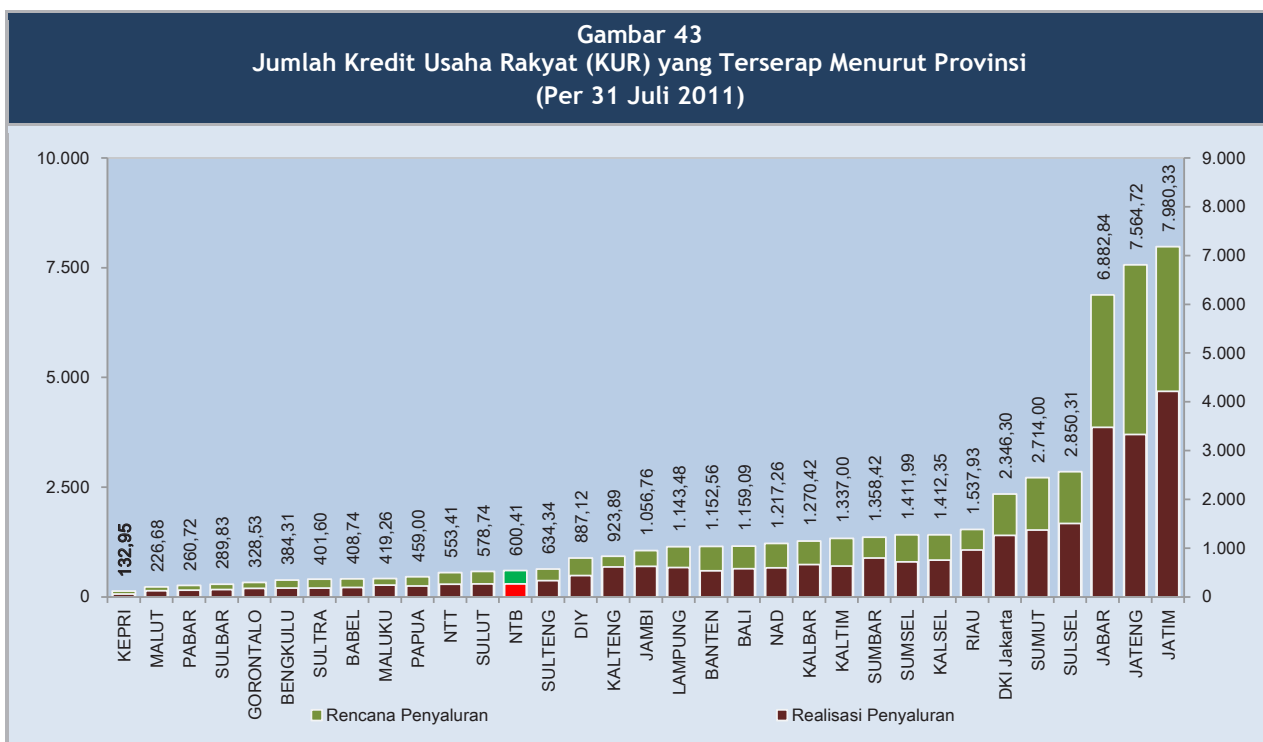


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

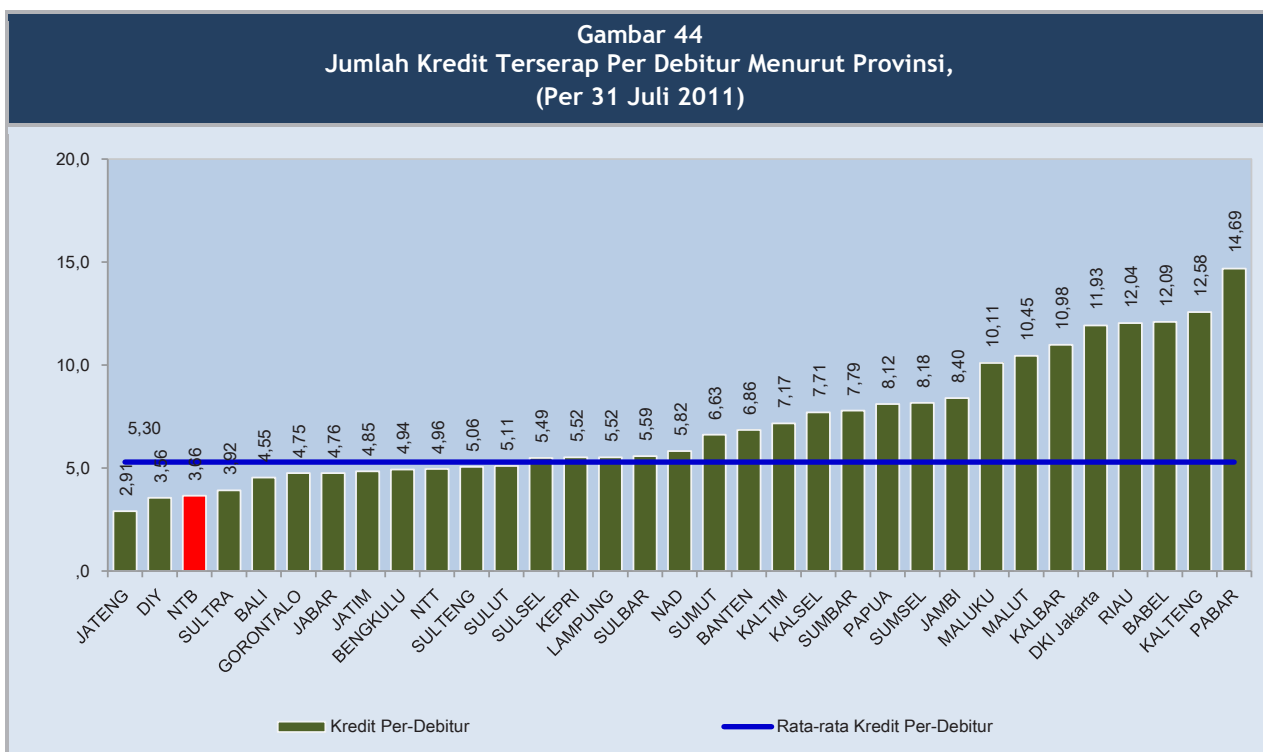


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

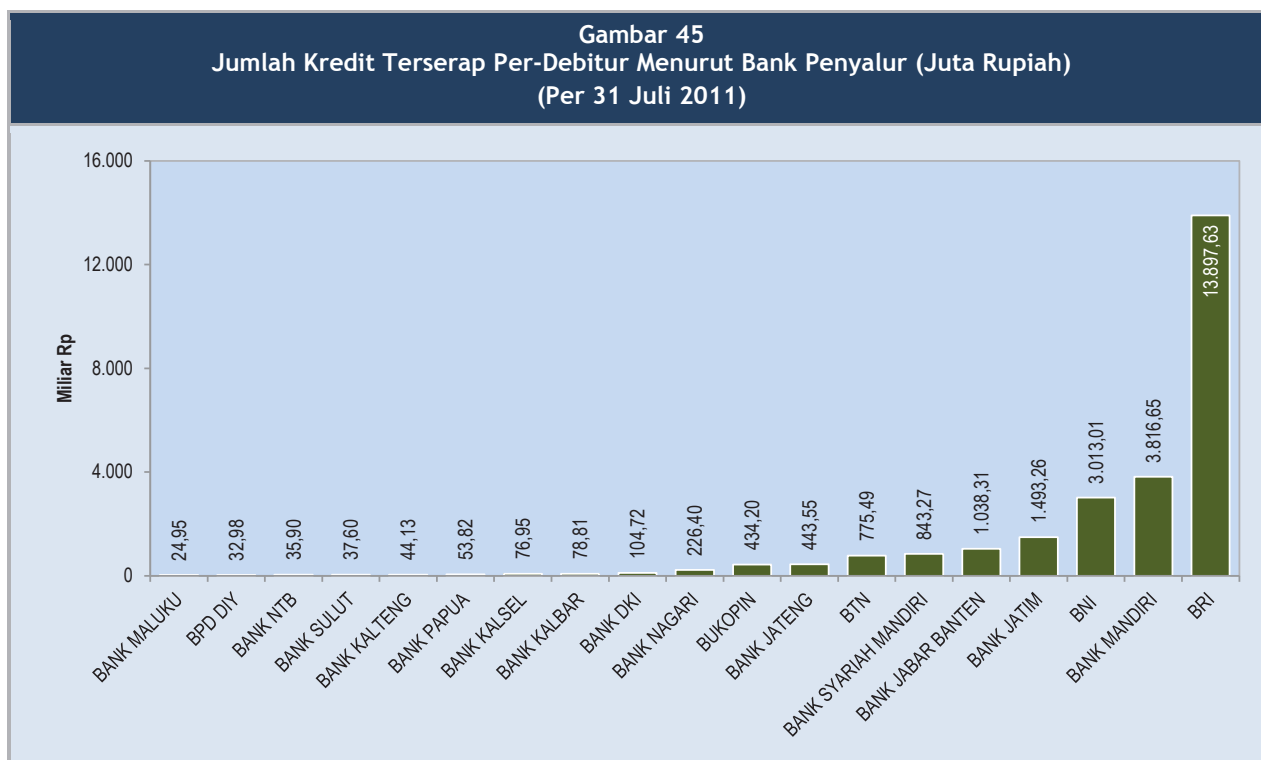


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

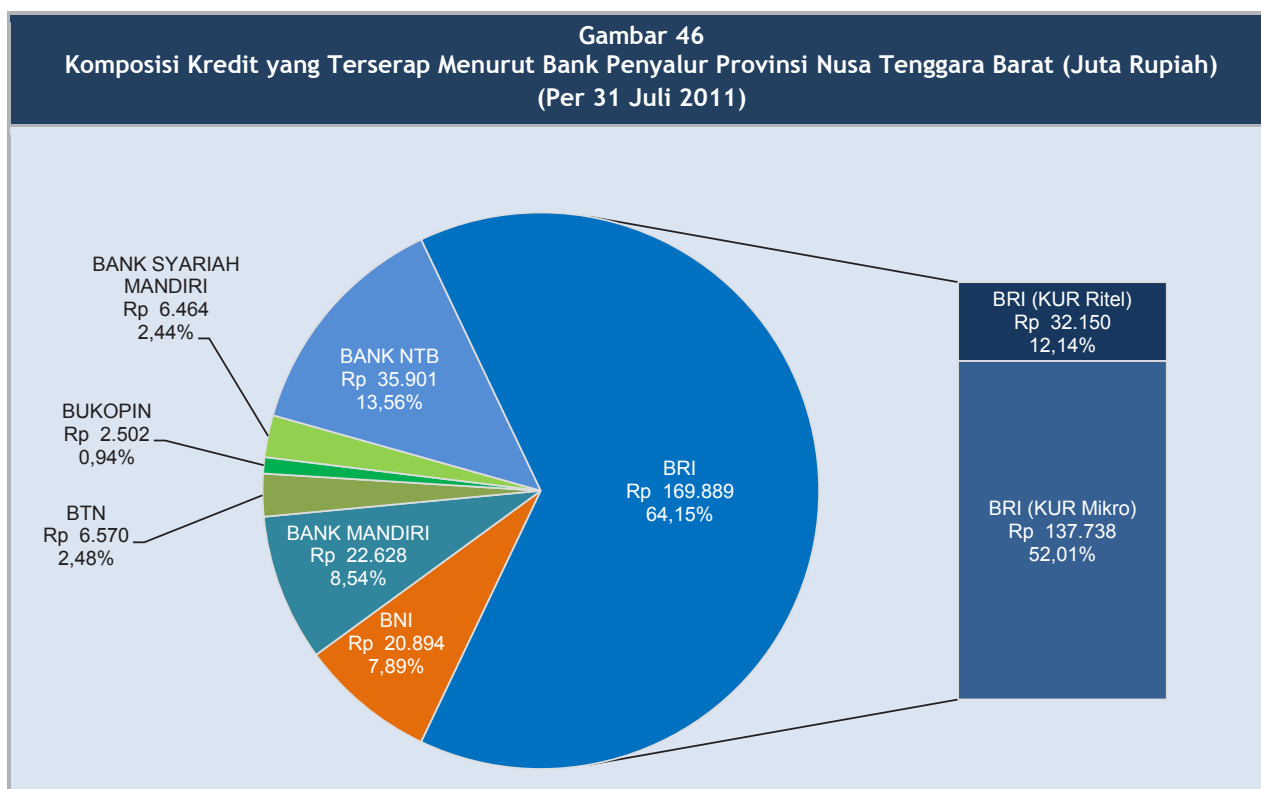


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

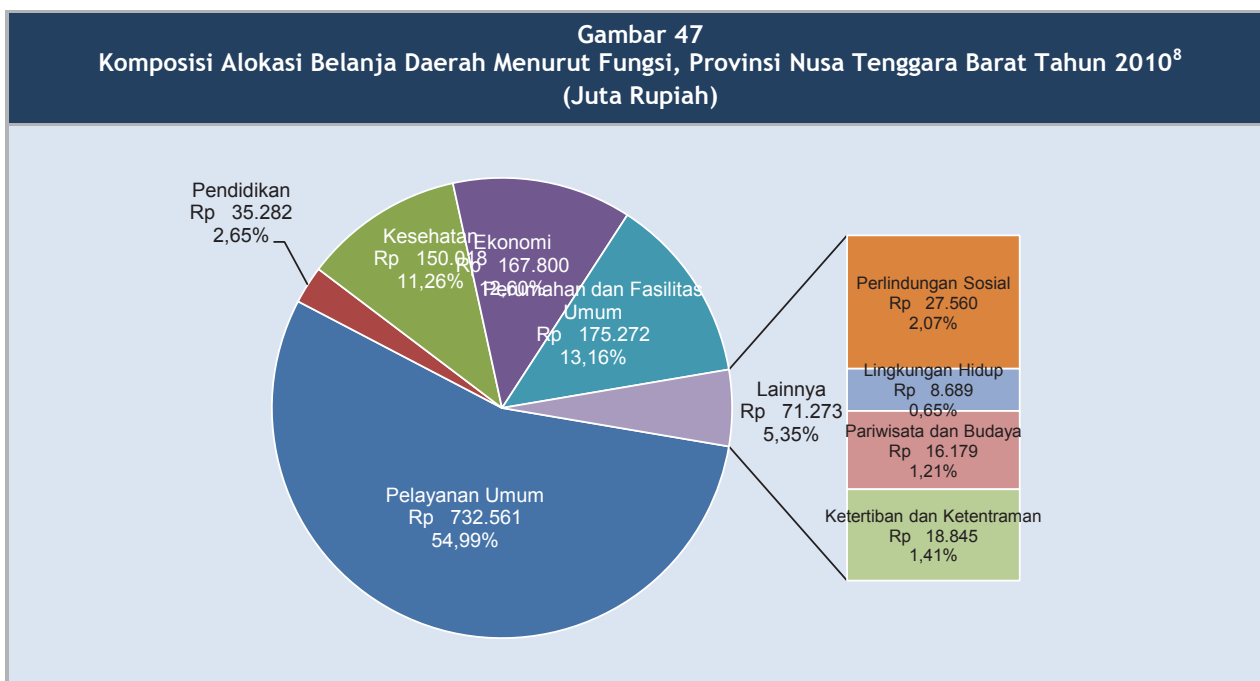


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

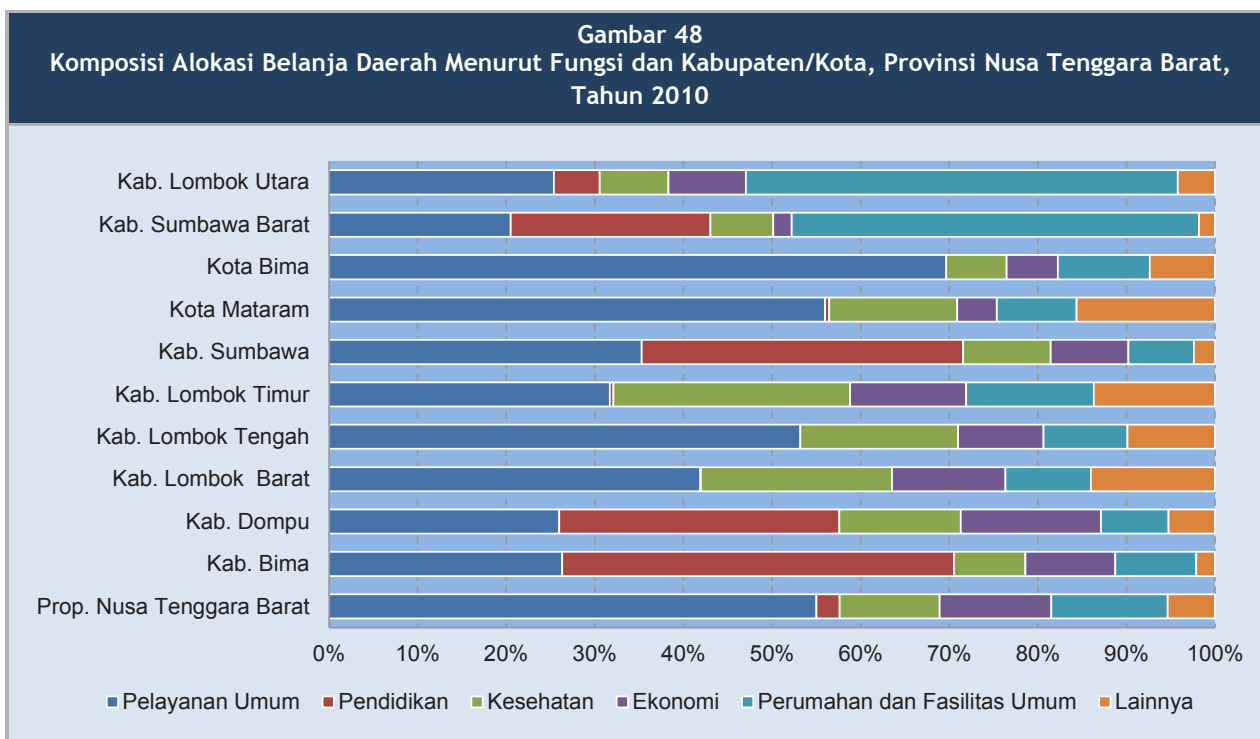


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KEUANGAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

⁸ Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).